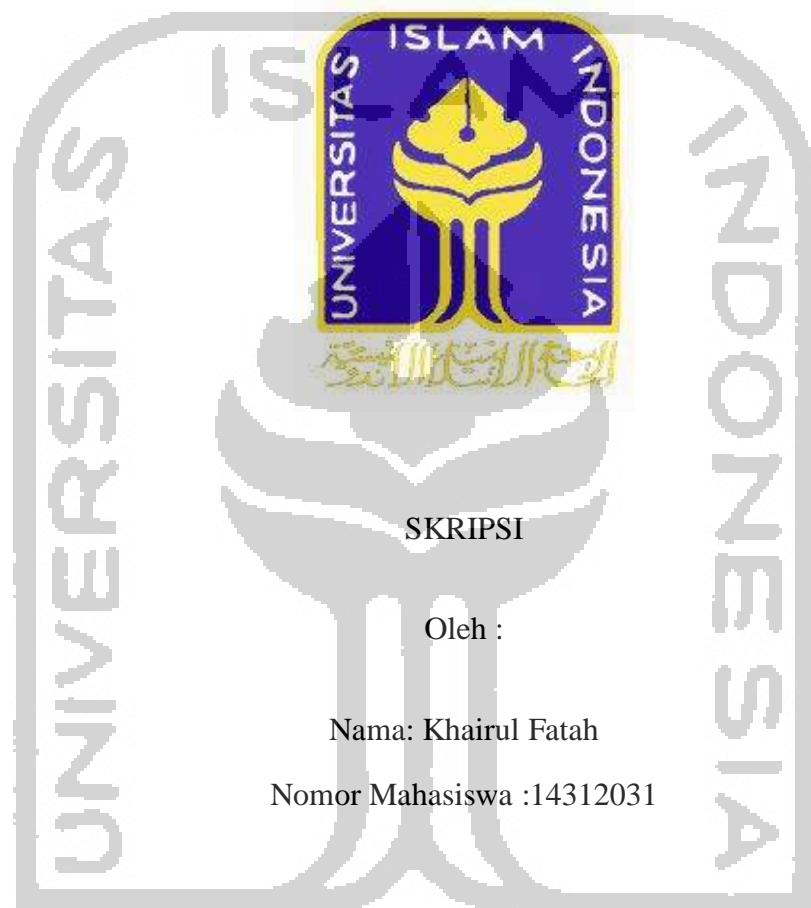


**PENGGAMBARAN TINDAK KECURANGAN PADA SEKTOR PUBLIK
MELALUI PEMBERITAAN MEDIA DI INDONESIA TAHUN 2017-2018**



SKRIPSI

Oleh :

Nama: Khairul Fatah

Nomor Mahasiswa :14312031

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

**PENGAMBARAN TINDAK KECURANGAN PADA SEKTOR PUBLIK
MELALUI PEMBERITAAN MEDIA DI INDONESIA TAHUN 2017-2018**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata- 1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Khairul Fatah

No. Mahasiswa: 14312031



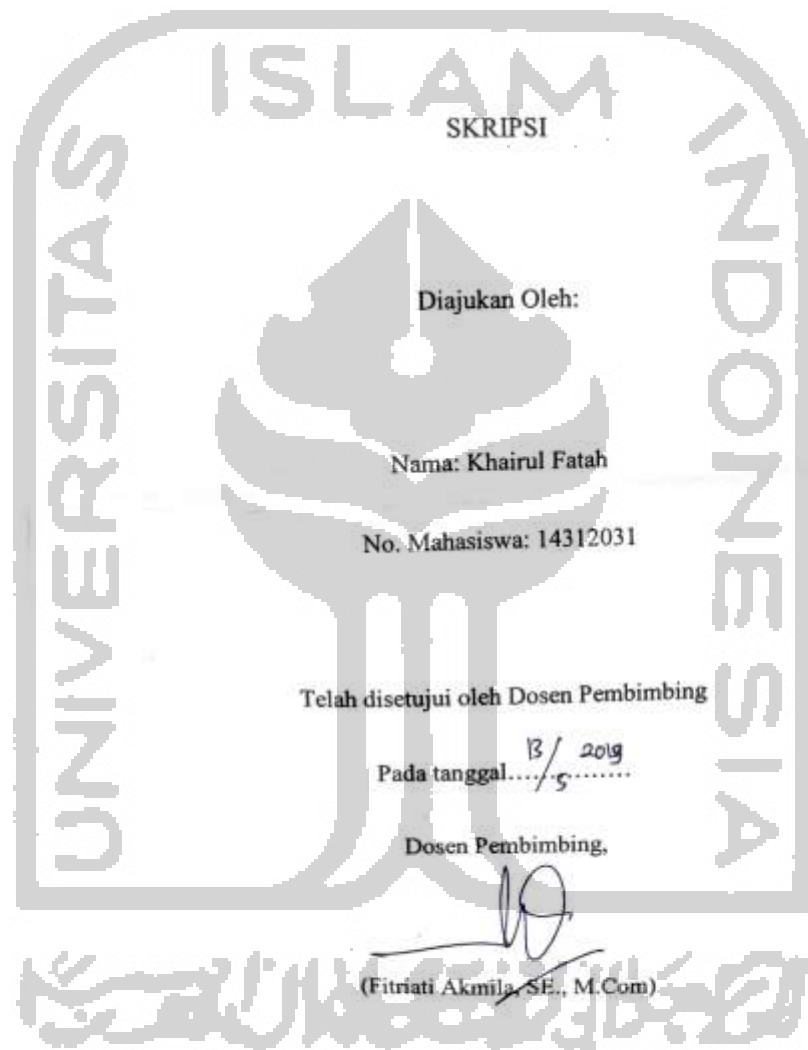
FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

**PENGGAMBARAN TINDAK KECURANGAN PADA SEKTOR PUBLIK
MELALUI PEMBERITAAN MEDIA DI INDONESIA TAHUN 2017-2018**



BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENGAMBARAN TINDAK KECURANGAN PADA SEKTOR PUBLIK MELALUI
PEMBERITAAN MEDIA DI INDONESIA TAHUN 2017-2018

Disusun Oleh : KHAIRUL FATAH

Nomor Mahasiswa : 14312031

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS

Pada hari Rabu, tanggal: 19 Juni 2019

Penguji Pembimbing Skripsi : Fitriati Akmila, SE, M.Com.

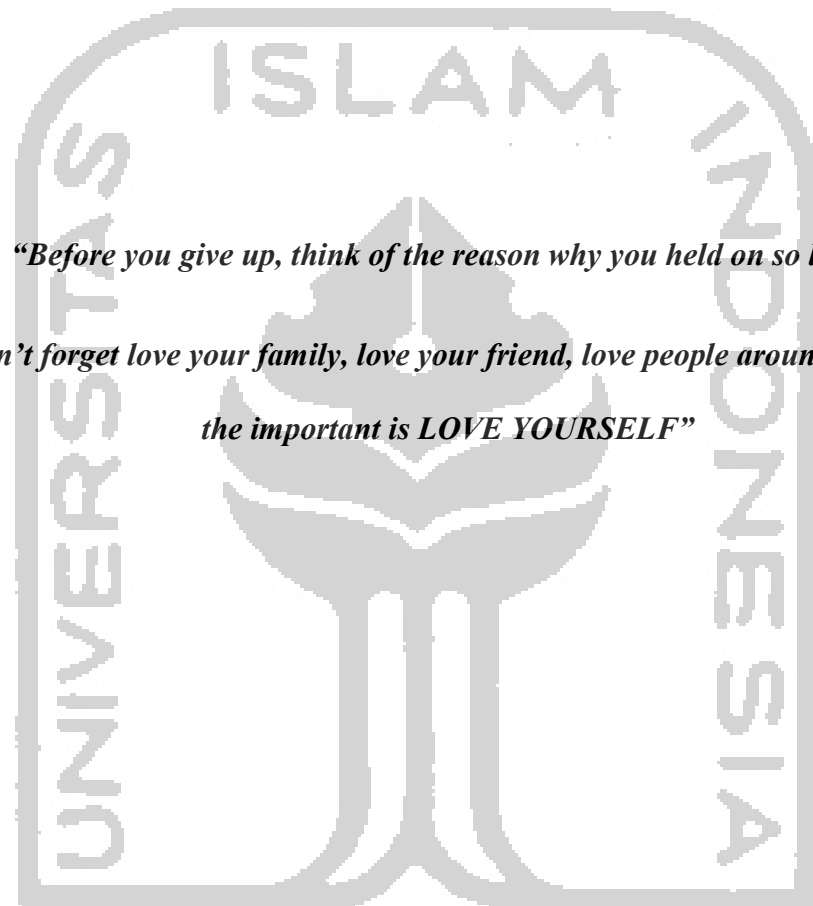
Penguji : Neni Meidawati, Dra.,M.Si., Ak,CA.

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Satriyana, SE., M.Si, Ph.D.

MOTTO

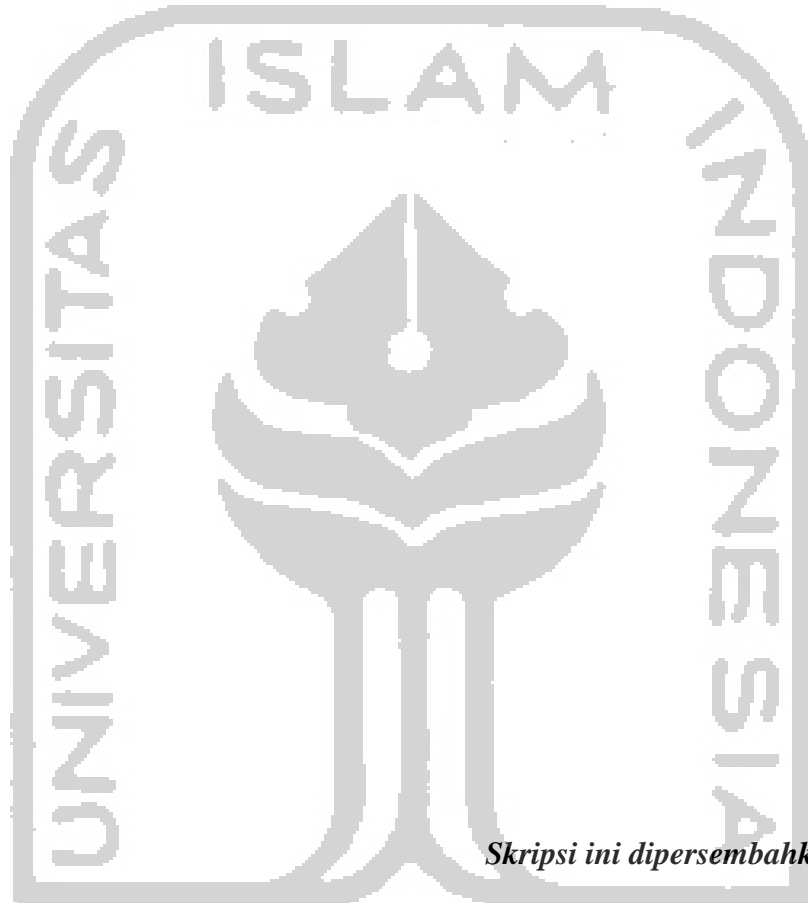


“Before you give up, think of the reason why you held on so long”

*“Don’t forget love your family, love your friend, love people around you, and
the important is LOVE YOURSELF”*

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ مَسْكُوتًا

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini dipersembahkan untuk :

Bapak (Iswandi) dan Mama (Warnati) tercinta

Adik-adiku (Ahni Nuraini) dan (Alfan Falah) tersayang

Juga tak lupa semua teman-temanku

Terimakasih untuk dukungan dan motivasinya



KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGAMBARAN TINDAK KECURANGAN PADA SEKTOR PUBLIK MELALUI PEMBERITAAN MEDIA DI INDONESIA TAHUN 2017-2018”**. Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, petunjuk, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Orang Tua yang penulis sayangi dan cintai Bapak Iswandi dan bu Warnati yang telah memberikan doa kepada penulis, yang tidak pernah berhenti memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik penulis Ahni Nuraini dan Alfan Falah atas motivasi dan doa yang selalu diberikan pada penulis.
3. Ibu Fitriati Akmila, SE., M.Com. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-

saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

4. Kepada sahabat-sahabat dekat penulis di Jogja yaitu Walang, Agil, Agung, Iman, Indra, Gendut, Toe, Purwo, Walied, Adex, Metis, Amel.
5. Sahabat kecilku yang selalu menemani hingga hari ini dan *In syaa Allah* sampai nanti ke dalam Syurga. **Muh. Mustaqim Hud** dan **Intan Permata Sari**. Terimakasih untuk seluruh kebersamaan, pertolongan, pengorbanan, do'a dan cinta.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan karunia dan hidayah-Nya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis. Akhir kata, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 24 Mei 2019

Penulis,

Khairul Fatah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALALAM PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN JUDUL.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN BERITA ACARA.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Definisi <i>Fraud</i>	8
2.2 Teori-teori Tentang Fraud	9
2.3 Fraud Triangle	11
2.4 Fraud Diamond	12
2.5 Jenis-jenis Fraud	13
2.6 Sistem Pemerintahan Indonesia	14

2.7 Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan	16
2.8 Penelitian Terdahulu	17

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian	21
3.2 Objek Penelitian	24
3.3 Instrumen Penelitian	24
3.4 Sumber Data Dan Pengumpulan Data	25
3.6 Teknik Analisis Data	26
3.7 Pengujian Keabsahan Data	26

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Kompas.com	29
4.2 Hasil Pengumpulan Data	33
4.2.1 Distribusi Surat Kabar untuk Kecurangan pada Sektor Pemerintahan Berdasarkan Bulan..	35
4.2.2 Distribusi Kasus Kecurangan Berdasarkan Jenis-Jenis Kecurangan.....	39
4.2.3 Distribusi Surat Kabar untuk Kecurangan Berdasarkan Daerah di Indonesia.....	41
4.2.4 Distribusi Surat Kabar untuk Kecurangan Berdasarkan Tingkat Pemerintahan.....	45
4.2.5 Distribusi Surat Kabar untuk Kecurangan Berdasarkan Departemen-Departemen.....	48
4.3 Kasus Korupsi Yang Dilakukan Para Kepala Daerah.....	52
4.4 Kesimpulan.....	53

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	55
5.2 Keterbatasan Penelitian	57

5.3 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
DAFTAR LAMPIRAN.....	61



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Distribusi Surat Kabar untuk Kecurangan pada Sektor Pemerintahan Berdasarkan Bulan.....	35
Tabel 4.2 Distribusi Kasus Kecurangan Berdasarkan Jenis-Jenis Kecurangan.....	39
Tabel 4.3 Distribusi Surat Kabar untuk Kecurangan Berdasarkan Daerah di Indonesia.....	41
Table 4.4 Distribusi Surat Kabar untuk Kecurangan Berdasarkan Tingkat Pemerintahan Indonesia.....	45
Tabel 4.5 Distribusi Surat Kabar untuk Kecurangan Berdasarkan Departemen-Depertemen.....	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 <i>Fraud Triangle</i> Menurut Donald R. Cressey.....	11
Gambar 2 <i>Fraud Diamond</i> Menurut Wolfe dan Hermanson.....	12
Gambar 3 Ketatanegaraan RI Sebelum Amandemen.....	15
Gambar 4 Ketatanegaraan RI Sesudah Amandemen.....	16
Gambar 5 Grafik Berita Selama Tahun 2018 di Kompas.....	30



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Januari Tahun 2017.....	62
Lampiran 2 Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Februari Tahun 2017.....	64
Lampiran 3 Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Maret Tahun 2017.....	66
Lampiran 4 Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan April Tahun 2017.....	69
Lampiran 5 Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Mei Tahun 2017.....	71
Lampiran 6 Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Juni Tahun 2017.....	73
Lampiran 7 Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Juli Tahun 2017.....	75
Lampiran 8 Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Agustus Tahun 2017.....	77
Lampiran 9 Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan September Tahun 2017.....	80
Lampiran 10 Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan September Tahun 2017....	83
Lampiran 11 Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan November Tahun 2017....	86
Lampiran 12 Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Desember Tahun 2017....	88
Lampiran 13 Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Januari Tahun 2018.....	90
Lampiran 14 Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Februari Tahun 2018.....	92
Lampiran 15 Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Maret Tahun 2018.....	94
Lampiran 16 Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan April Tahun 2018.....	96
Lampiran 17 Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Mei lTahun 2018.....	98
Lampiran 18 Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Jumi Tahun 2018.....	100
Lampiran 19 Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Juli Tahun 2018.....	102
Lampiran 20 Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Agustus Tahun 2018.....	104

Lampiran 21 Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan September Tahun 2018...	106
Lampiran 22 Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Oktober Tahun 2018.....	108
Lampiran 23 Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan November Tahun 2018...	110
Lampiran 23 Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Desember Tahun 2018...	113
Lampiran 24 Rangkuman Pemberitaan Berdasarkan Daerah di Indonesia.....	115



ABSTRACT

Acts of fraud in governments that are already familiar, such as corruption, abuse of power, and misappropriation of assets have tarnished the image of the Indonesian government many years ago. These acts of fraud are violations of social rights and economic rights of the community. So that corruption is classified as an extraordinary crime. Records of corruption and other acts of fraud which are reported by the print media and electronic media every day, seen by the increase and development of corruption models. This study aims to see the description of the pattern and frequency of reporting on fraud in the Indonesian government through the best newspaper media. This research is a descriptive qualitative study using the content analysis method of fraud which was reported by newspaper media online on news sites used as data sources. The results of this study show that the news about corruption is the most widely reported and attracts the attention of the public who observe the development of each case. The e-KTP corruption case is the largest and most widely reported case in 2017. In 2018 many regional heads were caught in cases of corruption, bribery and gratification. Jambi Governor Zumi Zola was one of those who was caught in a corruption and gratification case, instead of being a connector for the aspirations of the people of Jambi Zumi, it actually harmed the country with almost 100 billion rupiah and many of these cases involved many major figures in the minister of internal affair.

Keyword: *Fraud, Corruption, Government, Media*

ABSTRAK

Tindak kecurangan dalam pemerintahan yang sudah tidak asing lagi seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan penyelewengan asset sudah banyak menodai citra pemerintahan Indonesia sejak bertahun-tahun lalu. Tindak kecurangan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Sehingga korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa. Berbagai catatan tentang korupsi dan tindak kecurangan lainnya yang setiap hari diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik, terlihat adanya peningkatan dan pengembangan model-model korupsi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat penggambaran pola dan frekuensi pemberitaan mengenai tindak kecurangan pada pemerintahan Indonesia melalui media surat kabar terbaik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode konten analisis atas tindak kecurangan yang diberitakan oleh media surat kabar secara online pada situs berita yang digunakan sebagai sumber data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berita tentang korupsi paling banyak diberitakan dan menarik perhatian masyarakat yang mengamati perkembangan dari tiap-tiap kasus yang ada. Kasus korupsi e-KTP merupakan kasus terbesar dan terbanyak diberitakan sepanjang tahun 2017. Pada tahun 2018 banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, suap dan gratifikasi. Gubernur Jambi Zumi Zola merupakan salah satu yang terjerat kasus korupsi dan gratifikasi tersebut, bukannya menjadi penyambung aspirasi masyarakat jambi Zumi justru merugikan negara dengan nominal hampir 100 milyar rupiah dan masih banyak Kasus-kasus tersebut yang melibatkan banyak tokoh besar dalam kementerian dalam negeri.

Kata Kunci: Tindak Kecurangan, Korupsi, Pemerintahan, Media

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Selain pengertian tersebut, korupsi juga dapat diartikan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji dan dapat merugikan suatu bangsa. Korupsi dalam praktiknya, memiliki beragam makna. Sejumlah pakar dari berbagai disiplin ilmu bersilang pendapat untuk merumuskan pengertian yang paling memadai. Seorang pejabat dikatakan korupsi apabila ia menerima hadiah dari seseorang agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan sang pemberi hadiah. Meminta hadiah atau balas jasa karena terlaksananya suatu tugas yang sebenarnya adalah kewajiban, istilah korupsi kadang juga dikenakan pada pejabat yang menggunakan uang negara yang berada di bawah pengawasannya untuk kepentingan pribadi.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rajardjo mengatakan, pertumbuhan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia paling tinggi dibandingkan negara-negara lain di dunia. Pada awalnya, Agus terlebih dulu memaparkan IPK Indonesia yang terendah di ASEAN pada tahun 1998. Agus memaparkan, IPK Indonesia waktu itu sebesar 20, Filipina sebesar 33, Thailand sebesar 30 dan Malaysia mencapai skor 53. Sementara IPK Singapura, lanjut Agus, sudah meningkat lebih jauh dari negara kawasan. Namun seiring

perkembangan, Agus melihat, IPK Indonesia mengalami pertumbuhan yang tinggi meskipun belum ideal. Menurut Agus, capaian IPK Indonesia saat ini tak lepas dari kerja keras seluruh pihak sejak pemerintahan Indonesia mulai dari era mantan Presiden BJ Habibie hingga Presiden Joko Widodo saat ini (Kompas,2018).

Pengertian korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Akan tetapi menurut buku yang menjadi referensi bagi penulis pengertian korupsi sendiri yang juga dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian korupsi sebagai berikut :”penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain)”.

Ditemukannya berbagai macam kasus korupsi yang menyeret pejabat publik dalam instansi pemerintahan menjadikan citra Indonesia menurun dalam dunia internasional. Terbukti dengan terungkapnya kasus korupsi yang terjadi di dalam pemerintahan, negara mengalami kerugian yang tidak sedikit. Keterlibatan pejabat publik dalam melakukan tindakan korupsi membuat pelayanan negara dalam melayani masyarakatnya tidak dapat berjalan dengan maksimal.

Fraud atau kecurangan merupakan penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut. Kecurangan itu sendiri secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang

dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Orang awam seringkali mengasumsikan secara sempit bahwa *fraud* sebagai tindak pidana atau perbuatan korupsi (Anisa,2016).

Kasus - kasus kecurangan atau korupsi sering diberitakan di Indonesia, pada tahun 2018 KPK menangani 178 kasus korupsi. Sebanyak 152 di antaranya adalah kasus penyuapan, contohnya seperti Bupati Jepara Ahmad Marzuki Ia diduga menyuap hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Lasito sebesar Rp 700 juta. Tidak sedikit pula nominal yang dilahap para koruptor yang sangat merugikan negara. Kasus korupsi sangat menodai citra institusi sektor pemerintahan yang harusnya menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas kepada masyarakat luas. Platform utama yang umum untuk menyoroti kasus korupsi di kalangan pegawai di sektor pemerintahan ini adalah media. Sudah menjadi hak publik untuk diberi tahu mengenai bagaimana pihak berwenang mengelola aset publik dan apakah pegawainya telah menyalahgunakan tanggung jawab mereka. Paparan semacam itu dapat memaksa badan-badan yang terlibat untuk memantau aktivitas pegawai mereka secara ketat dan menggunakan tindakan pencegahan yang efektif untuk mencegah kejadian tersebut berulang.

Pada penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Aishah (2017) tentang pemberitaan kasus-kasus korupsi di Malaysia melalui empat surat kabar umum dalam dua Bahasa yaitu Bahasa Melayu dan Bahasa Inggris. Aishah (2017) menyimpulkan bahwa surat kabar Bahasa Inggris melaporkan kasus korupsi lebih tinggi yang melibatkan pegawai sektor publik dari pada surat kabar Malaysia itu

sendiri selama tahun 2016 dan berhasil mengumpulkan sebanyak 603 berita dari empat surat kabar. Media tertinggi yang melaporkan kecurangan adalah kasus penipuan yang melibatkan Departemen Air Sabah (SWD), sementara kasus kecurangan tertinggi dilaporkan di antara pemerintah negara bagian, diikuti oleh pemerintah federal dan pemerintah daerah. Dalam penelitian yang dilakukan Amalia (2018) menyimpulkan bahwa surat kabar terbesar di Indonesia yakni Kompas.com melaporkan korupsi adalah yang paling banyak dilaporkan dan menarik perhatian publik yang mengamatinnya dan ikuti perkembangan setiap kasus. Berita korupsi E-KTP adalah kasus terbesar dan paling banyak dilaporkan selama 2017, melibatkan banyak tokoh populer di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta Pemerintah Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini melakukan penelitian tentang topik yang sama namun menambah tahun sampe dengan tahun 2018.

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti bermaksud melakukan penelitian yang berjudul: **Penggambaran Tindak Kecurangan Pada Sektor Publik Melalui Pemberitaan Media di Indonesia Tahun 2017-2018.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikemukakan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pola pemberitaan media mengenai berita korupsi pada sektor pemerintahan?
2. Seberapa tinggi frekuensi pemberitaan media mengenai berita korupsi pada sektor pemerintahan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui jenis media yang memberitakan berita korupsi pada sector pemerintahan di Indonesia.
2. Mengetahui seberapa tinggi frekuensi pemberitaan berita korupsi pada sektor pemerintahan di Indonesia.
3. Mengetahui pola pemberitaan berita korupsi pada sektor pemerintahan.

1.4 Manfaat Penelitian

Harapan penelitian ini dapat bermanfaat untuk :

- 1) Bagi akademisi, sebagai kontribusi pada literatur-literatur terdahulu mengenai pola pemberitaan berita korupsi yang marak di beritakan dimedia di Indonesia.
- 2) Bagi pembaca diharapkan penelitian ini dapat manambah wawasan, pengetahuan dan gambaran yang jelas sejauh mana tercapai keselarasan antara pengetahuan secara teoritis dan praktiknya.

- 3) Bagi penelitian yang akan datang, sebagai acuan terutama penelitian yang berkaitan dengan pemberitaan media mengenai kecurangan pada sektor publik di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang terjadinya masalah, batasan masalah/fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang penjabaran dan pengertian mengenai teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini serta penjabaran mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang alasan penulis menggunakan metode kualitatif, alasan dalam memilih tempat penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pengujian keabsahan data yang digunakan penulis dalam penelitiannya.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil analisis dan pembahasannya. Bagian ini memuat semua temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian. Hasil analisis digunakan penulis untuk menjawab rumusan permasalahan berdasarkan pada telaah teoritik dan metodologi yang telah ditetapkan sebelumnya.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dalam penelitian, dan saran dari penulis.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan dan pembahasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian dan penelitian-penelitian terdahulu yang diharapkan dapat membantu penulis untuk menjalankan penelitian ini. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai *Definisi Fraud*, *Jenis-Jenis Fraud*, *Teori-Teori Tentang Fraud*, *Fraud Triangle* dan *Fraud Diamond*, *Sistem Pemerintahan di Indonesia* dan *Fraud di Sektor Pemerintahan*.

2.1 Definisi *Fraud*

Definisi *fraud* Menurut Romney (2014) adalah sesuatu atau segala sesuatu yang digunakan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil terhadap orang lain. Tindakan curang meliputi kebohongan, penyembunyian kebenaran, muslihat dan kelicikan, dan tindakan tersebut sering mencakup pelanggaran kepercayaan. Pelaku penipuan sering disebut sebagai penjahat berkerah putih (*white collar criminals*), untuk membedakannya dari penjahat yang melakukan kejahatan dengan kekerasan.

Ahmed Belkaoui (1989) dalam Suedi (2010) berpendapat bahwa kecurangan punya banyak definisi. Kecurangan adalah suatu kejahatan (*crime*). Secara umum dapat disimpulkan bahwa kecurangan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran yang dibuat dengan sengaja, dengan tujuan untuk memperoleh sesuatu yang bukan hak pelakunya.

Menurut Sarah dkk. (1998) dalam Aishah (2016) mengembangkan taksiran kecurangan untuk mengklasifikasikan kecurangan menurut jenisnya. Taksonomi

memiliki 12 kategori umum yang terdiri dari "pendapatan fiktif, pengakuan pendapatan prematur, kesalahan klasifikasi, aset fiktif atau pengurangan biaya/kewajiban, aset terlalu tinggi dan biaya/kewajiban yang dinilai terlalu rendah, kewajiban yang dilewatkan atau undervalued (mempengaruhi biaya atau aset), diabaikan atau Pengungkapan yang tidak tepat, kecurangan ekuitas, transaksi pihak terkait, kecurangan menjadi "cara yang salah" (yang mengecilkan pendapatan/asset), tindakan ilegal dan lain-lain (termasuk masalah konsolidasi). Setiap kategori berisi beberapa skema penipuan individu.

2.2 Teori-Teori tentang *Fraud*

Menurut Merriam Webster's Dictionary of Law (1996) sebagaimana dikutip Manurung & Hadian (2013) dalam Mansor & Abdullahi (2015), *fraud* adalah:

“Tindakan, ekspresi, kelalaian, atau penyembunyian yang dikalkulasi untuk menipu orang lain karena kerugiannya, khususnya, kesalahan penyajian atau penyembunyian dengan merujuk pada beberapa bahan fakta untuk suatu transaksi yang dibuat dengan pengetahuan kepalsuannya. Dan atau tanpa menghiraukan kebenaran atau kepalsuannya dan sepadan dengan niat untuk menipu orang lain dan yang cukup diandalkan oleh orang lain yang terluka karenanya.”

Kecurangan adalah perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/ harta, jasa, dan tidak

membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, pegawai, atau pihak ketiga.

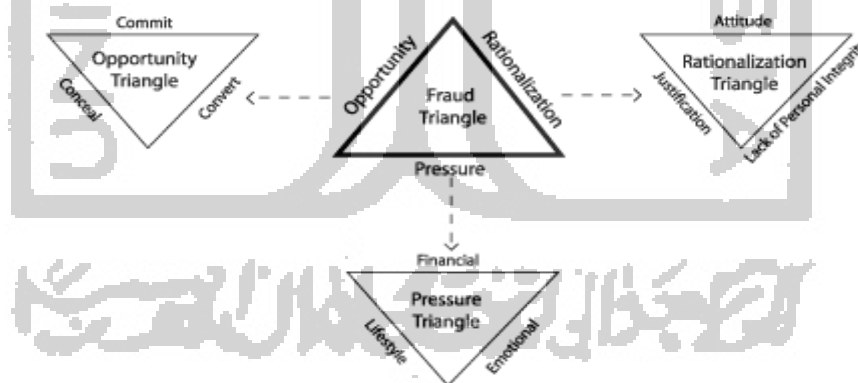
Terkandung aspek dari *fraud* adalah penipuan (*deception*), ketidakjujuran (*dishonest*) dan niat (*intention*). *Fraud* menyangkut cara-cara yang dihasilkan oleh akal manusia yang dipilih oleh seseorang untuk mendapatkan suatu keuntungan dari pihak lain dengan penyajian yang salah/palsu. Kecurangan mencakup kejut, tipu daya, cara-cara licik dan tidak jujur yang digunakan untuk menipu orang lain (Zulkarnain 2013). Hal ini sejalan dengan pendapat Singleton (2006), yang mengemukakan bahwa *fraud, theft, defalcation, irregularities, white collar crime*, dan *embezzlement* adalah terminologi yang sering dipertukarkan

Berkaitan dengan pendekatan keorganisasian untuk mengendalikan fraud di lingkungan organisasi pemerintah, BPKP (2010) mengungkapkan bahwa walaupun upaya represif terhadap fraud telah dilakukan secara intensif, namun kerentanan organisasi pemerintah terhadap fraud dari hari ke hari cenderung meningkat. Pimpinan organisasi dapat mempelajari bagaimana penyimpangan terjadi, siapa yang melakukan, bagaimana mereka dapat melakukannya, bagaimana kecurangan terdeteksi, dan sebagainya, sehingga dapat mengambil langkah untuk memaksimalkan kemampuan organisasi untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya *fraud*.

2.3 Fraud Triangle

Teori yang mendasar dari penelitian ini adalah fraud triangle theory. Penelitian tradisional tentang kecurangan dilakukan pertama kali oleh Donald Cressey pada tahun 1950. Melalui serangkaian wawancara dengan 113 orang yang telah di hukum karena melakukan penggelapan uang perusahaan yang disebutnya “*trust violators*” atau “pelanggar kepercayaan”.

Romney dan Steinbart (2014) menyimpulkan bahwa : Cara yang umum dan efektif untuk menyembunyikan pencurian adalah untuk membebaskan item yang dicuri ke suatu akun biaya. Cara lain untuk menyembunyikan penurunan asset adalah dengan cara gali lubang tutup lubang (*lapping*). Dalam skema gali lubang tutup lubang, pelaku mencuri uang yang diterima dari pelanggan A untuk membayar piutangnya. Di dalam skema perputaran (*kitting*), pelaku menutupi pencuriannya dengan cara menciptakan uang melalui transfer uang antar bank.

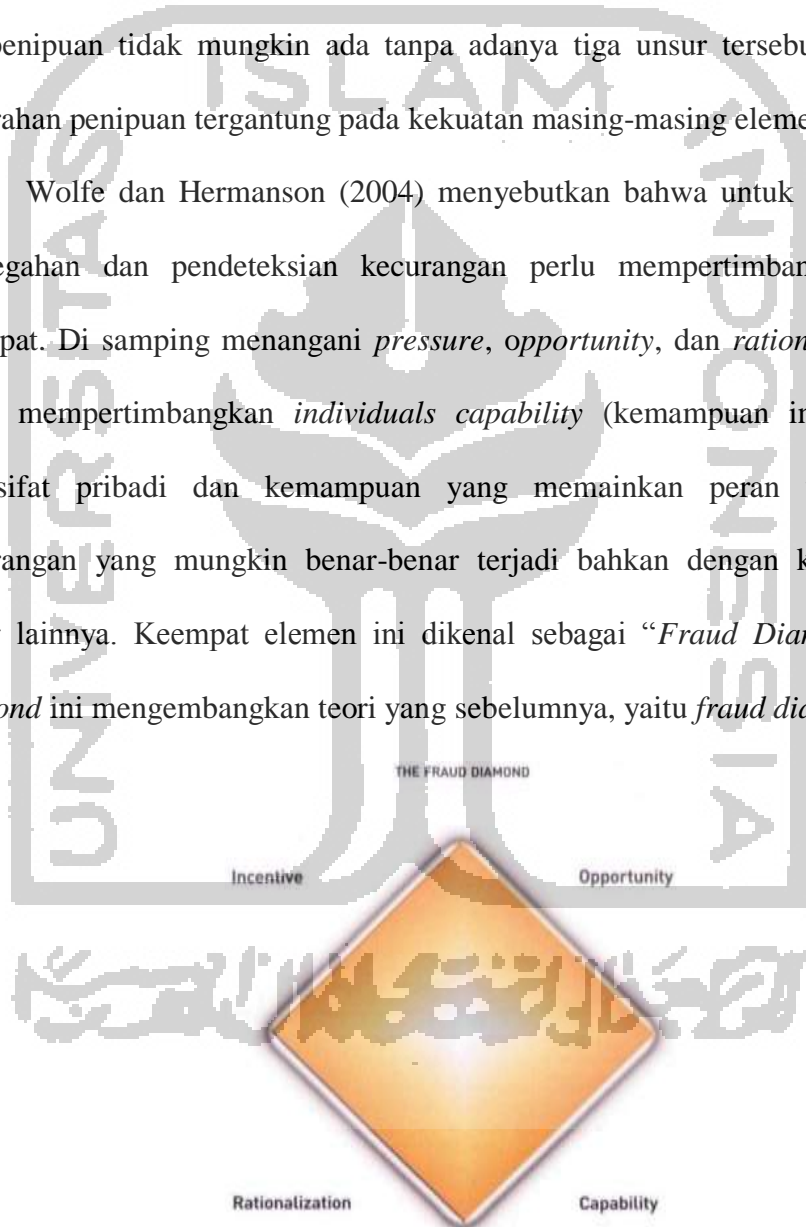


Gambar 1. *Fraud Triangle* menurut Marshall B. Romney (2014)

2.4 *Fraud Diamond*

Howe & Malgwi (2006) dalam Ruankaew (2016) menjelaskan bahwa teori *fraud diamond* terdiri dari tiga unsur untuk melakukan pencurian atau penipuan yaitu tekanan yang dirasakan, kesempatan, dan rasionalisasi. Berdasarkan teori ini, penipuan tidak mungkin ada tanpa adanya tiga unsur tersebut dan tingkat keparahan penipuan tergantung pada kekuatan masing-masing elemen.

Wolfe dan Hermanson (2004) menyebutkan bahwa untuk meningkatkan pencegahan dan pendeteksian kecurangan perlu mempertimbangkan elemen keempat. Di samping menangani *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization* juga harus mempertimbangkan *individuals capability* (kemampuan individu) yaitu sifat-sifat pribadi dan kemampuan yang memainkan peran utama dalam kecurangan yang mungkin benar-benar terjadi bahkan dengan kehadiran tiga unsur lainnya. Keempat elemen ini dikenal sebagai "*Fraud Diamond*". *Fraud diamond* ini mengembangkan teori yang sebelumnya, yaitu *fraud diamond*.



Gambar 2.1 Teori *Fraud Diamod*
Sumber: Wolfe dan Hermanson (2004)

2.5 Jenis-Jenis *Fraud*

Steve (2002) dalam Hutomo (2012) menjelaskan lima jenis *fraud* sebagai berikut:

1. *Employee Embezzlement employee*

Pencurian yang dilakukan oleh karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan.

2. *Management fraud*

Merupakan jenis *fraud* yang dilakukan oleh top management kepada stockholders dan pengguna laporan keuangan dengan cara memberikan informasi yang bias dalam laporan.

3. *Investment scam*

Jenis *fraud* yang dilakukan oleh perorangan kepada investor dengan melakukan kebohongan melalui penanaman modal.

4. *Vendor fraud*

Kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan/individu yang menjual barang atau jasa kepada perusahaan yang membeli barang atau jasa. *Fraud* ini dilakukan perusahaan dengan mengeluarkan tarif yang mahal dalam hal pengiriman barang.

5. *Customer fraud*

Fraud yang dilakukan oleh pelanggan kepada perusahaan yang menjual barang atau jasa. Perusahaan menipu penjual agar mereka mendapatkan sesuatu yang lebih dari seharusnya.

Johnstone mendefinisikan (2014) bahwa Kecurangan sebagai berikut:

1. Salah Saji Timbul Dari Penyalagunaan Aset

Penyalahgunaan aset terjadi ketika pelaku mencuri atau menyalahgunakan suatu aset organisasi. Penyelewengan aset adalah skemapenipuan yang dominan dilakukan terhadap usaha kecil dan para pelaku biasanya karyawan.

Penyalahgunaan aset terjadi ketika karyawan:

- a) Mendapatkan akses ke uang tunai dan memanipulasi untuk menutupi pencurian kas.
- b) Memanipulasi pengeluaran kas melalui perusahaan palsu.
- c) Mencuri persediaan atau aset lain dan memanipulasi catatan keuangan untuk menutupi penipuan.

2. Salah Saji Transaksi Penipuan Pelaporan Keuangan

Manipulasi secara sengaja terhadap hasil keuangan dengan mengutarakan kondisi ekonomi organisasi yang salah pada pelaporan keuangan. Tiga cara umum kondisi penipuan laporan keuangan dapat terjadi antara lain:

- a) Manipulasi, pemalsuan catatan akuntansi atau mendukung dokumen.
- b) Keliru atau kelalaian dari peristiwa, transaksi, atau orang penting lainnya informasi.
- c) Penyalahgunaan disengaja prinsip akuntansi.

2.6 Sistem Pemerintahan Indonesia

Secara teori, berdasarkan UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil. Namun dalam prakteknya banyak bagian-bagian dari sistem pemerintahan parlementer yang masuk ke dalam sistem pemerintahan di

Indonesia. Sehingga secara singkat bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang berjalan di Indonesia adalah sistem pemerintahan yang merupakan gabungan atau perpaduan antara sistem pemerintahan presidensiil dengan sistem pemerintahan parlemen. Apalagi bila dirunut dari sejarahnya, Indonesia mengalami beberapa kali perubahan sistem pemerintahan. Indonesia pernah menganut sistem kabinet parlementer pada tahun 1945 - 1949, kemudian pada rentang waktu tahun 1949 - 1950, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer yang semu.

Pada tahun 1950 - 1959, Indonesia masih menganut sistem pemerintahan parlementer dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Sedangkan pada tahun 1959 - 1966, Indonesia menganut sistem pemerintahan secara demokrasi terpimpin. Perubahan dalam sistem pemerintahan tidak hanya berhenti sampai disitu saja. Karena terjadi perbedaan pelaksanaan sistem pemerintahan menurut UUD 1945 sebelum UUD 1945 diamandemen dan setelah terjadi amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 - 2002. Berikut ini adalah perbedaan sistem pemerintahan sebelum terjadi amandemen dan setelah terjadi amandemen pada UUD 1945 :



Sebelum Terjadi Amandemen :



Gambar 3. Pemerintahan RI Sebelum Amandemen

Setelah Terjadi Amandemen :



Gambar 3. Pemerintahan RI Sesudah Amandemen

Dalam sistem pemerintahan presidensiil yang dianut di Indonesia, pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang menjadi perhatian. Selain itu, pengawasan rakyat terhadap pemerintahan juga kura begitu berpengaruh karena

pada dasarnya terjadi kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan yang ada di tangan presiden. Selain itu, terlalu sering terjadi pergantian pejabat di kabinet karena presiden mempunyai hak prerogatif untuk melakukan itu.

2.7 Kecurangan (*Fraud*) di Sektor Pemerintahan

Fraud yang saling terjadi di sektor pemerintahan Indonesia adalah Korupsi. Korupsi berasal dari bahasa latin, (*Corruptio- Corrumper*) yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikan atau menyogok. Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Menurut (UU No. 31 Tahun 1999) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

Kasus korupsi di instansi pemerintahan tidak hanya melibatkan orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi tetapi juga orang-orang yang berada dibawahnya. Serta tidak hanya terjadi pada lingkungan pemerintah pusat namun juga di pemerintahan daerah bahkan di lingkup pemerintahan yang terkecil sekalipun, korupsi masih saja terjadi. Tindak korupsi yang seringkali dilakukan diantaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan (*Markup*) yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kecurangan ini biasanya

dipicu adanya kesempatan untuk melakukan penyelewengan. Dalam instansi pemerintah sering terjadi kasus penyelewengan aset negara atau aset daerah oleh pihak-pihak tertentu. Tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau suatu kelompok.

2.8 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kecurangan :

Penelitian oleh Levi et al. (2007) dan Levi and Burrows (2008) secara konservatif memperkirakan tingkat kecurangan berada di wilayah Inggris 14 miliar poundsterling per tahun di Inggris saja. Hampir setengah (6 miliar *poundsterling*) dari perkiraan ini 14 miliar poundsterling hilang dari kecurangan di sektor publik. Mengingat skala masalah di sektor publik, langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini seharusnya penting dalam prioritas politik, mengingat iklim fiskal yang semakin ketat di sektor publik. Penipuan, bagaimanapun, relatif terbengkalai oleh akademisi dan pembuat kebijakan jika dibandingkan dengan kejahatan lainnya (Levi, 2007).

Wilopo (2008) melakukan penelitian tentang pengaruh pengendalian internal, birokrasi pemerintah serta perilaku tidak etis dari birokrasi terhadap kecurangan akuntansi di Badan Pengawas Keuangan (BPK). Data responden yang digunakan pada penelitian ini adalah para pejabat auditor yang bekerja sebagai pengawas dan pemeriksa pada Badan Pengawas Keuangan (BPK). Penelitian tersebut relevansi dengan penelitian ini adalah mempunyai persamaan pada objek penelitaian yang akan diteliti yaitu pada sektor pemerintahan, metode yang

digunakan penelitian ini menggunakan data primer dalam bentuk kuesioner. Perbedaan pada penelitian ini yaitu dalam penelitian tersebut menggali persepsi auditor pemerintahan, sedangkan penelitian ini menggali persepsi auditee pemerintahan yaitu instansi yang diaudit untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi fraud di sektor pemerintahan.

Pawi dkk. (2011) berpendapat bahwa pemerintah daerah Malaysia bertanggung jawab atas pengelolaan infrastruktur dan fasilitas publik yang benar untuk memastikan integritas dan tingkat kepuasan masyarakat dikelola dengan baik. Studi oleh Aziz dkk (2015) juga menyebutkan masalah yang diangkat oleh surat kabar lokal mengenai sektor publik Malaysia yang mengalami kesulitan dalam mengelola properti dan fasilitas mereka, yang pada akhirnya dapat merusak nilai integritas di sektor publik. Kegagalan pengelolaan aset yang efisien dan efektif telah menghasut pemerintah federal untuk menghadapi beberapa masalah, sehingga membebani otoritas dan publik.

Haniza Hanim, Norazidah dan Jamaliah (2017) menemukan hubungan positif antara unsur segitiga penipuan (tekanan, peluang dan rasionalisasi) dan kejadian penipuan di antara pegawai Polisi Royal Malaysian. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa setiap tindakan curang dapat dicegah bila karyawan memiliki integritas tinggi yang menuntut mereka untuk bertindak dengan penuh kejujuran dan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh organisasi.

Aishah (2017) melakukan penelitian tentang pemberitaan kasus-kasus korupsi di Malaysia melalui empat surat kabar umum dalam dua bahasa yaitu bahasa inggris dan melayu. Dimana hasilnya menunjukkan bahwa surat kabar

Inggris melaporkan kasus yang sedikit lebih tinggi daripada surat kabar Malaysia. Aishah berpendapat bahwa kurangnya integritas suatu lembaga terlepas dari sektor pemerintah ketika kepala departemen terlibat dalam kecurangan dengan menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Pemerintah perlu memikirkan langkah-langkah efektif untuk melawan kegiatan penipuan ini untuk memastikan sektor publik Malaysia diperintah kepercayaan etis dan publik dijunjung tinggi.

Amalia (2018) melakukan penelitian tentang pemberitaan kasus-kasus kecurangan di Indonesia melalui surat kabar terbesar di Indonesia yaitu Kompas.com dimana hasilnya bahwa Kompas.com melaporkan korupsi adalah yang paling banyak dilaporkan dan menarik perhatian publik yang mengamatinya dan ikuti perkembangannya disetiap kasus. Berita korupsi E-KTP adalah kasus terbesar dan paling banyak dilaporkan selama 2017, melibatkan banyak tokoh populer di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta Pemerintah Indonesia

Sementara penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada faktor atau alasan bagi individu yang melakukan kecurangan, belum banyak penelitian yang berfokus pada pelaporan kecurangan oleh media. Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi peran yang dimainkan oleh media dalam melaporkan kasus kecurangan yang melibatkan sektor publik atau dalam pemerintahan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang alasan penulis menggunakan metode kualitatif, alasan dalam memilih tempat penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data dan juga pengujian keabsahan data yang digunakan penulis dalam penelitiannya.

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan *content analysis technique* untuk menyaring data dari media surat kabar. Menurut Creswell (2010), penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Adapun pengertian penelitian kualitatif dapat dilihat dari beberapa teori berikut ini:

- a. Sugiyono (2014) menjelaskan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasinya.
- b. Penelitian kualitatif menurut Meleong (2014) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian,

misalnya: (1) Perilaku; (2) Persepsi; (3) Motivasi.

- c. Flick dalam Gunawan (2014) mendeskripsikan penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan obyek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial, dan persepsi sasaran sosial. Tujuan penelitian kualitatif adalah menggambarkan dan mengungkap dan menggambarkan dan menjelaskan. Kebanyakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan eksplanatori. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.

Dari beberapa teori-teori di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Dengan tujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian deskriptif berdasarkan tujuan penelitiannya. Penelitian deskriptif menurut Neuman: penelitian deskriptif menyajikan gambaran detail spesifik situasi, pengaturan sosial, atau hubungan. Hasil dari studi deskriptif adalah gambaran rinci tentang subjek.

Analisis isi (content analysis) adalah suatu analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus. Neuman (2014) mendefinisikan langkah-langkah kerja metode analisis isi meliputi :

1. Merumuskan topik dan rumusan masalah.
2. Menentukan unit analisis (misal menentukan jumlah teks yang dijadikan sebuah kode) lalu melakukan sampling dan mengembangkan sampling terhadap sumber data.
3. Menyusun kategori pengkodean dan membuat kertas kerja (worksheet) untuk penyimpanan data.
4. Pendataan suatu sampel dokumen yang telah dipilih dan melakukan pengkodean.
5. Pembuatan skala dan item berdasarkan kriteria tertentu untuk pengumpulan data.
6. Penafsiran data yang di peroleh dan menarik simpulan.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sifat keadaan dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas, dan kualitas yang bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro-kontra, simpati-antipati, keadaan batin, dan bisa juga berupa (Hanaf, 2011).

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan objek penelitian adalah ruang lingkup yang merupakan pokok persoalan dari suatu penelitian. Dan pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian oleh penulis adalah media surat kabar di Indonesia dan kasus-kasus korupsi yang terjadi pada sektor publik.

3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah. Instrumen penelitian dapat diartikan pula sebagai alat untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Jadi semua alat yang bisa mendukung suatu penelitian bisa disebut instrumen penelitian.

Dalam penelitian kualitatif ini yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti atau periset itu sendiri dan teknik analisis isi yang digunakan. Periset adalah bagian integral dari data, artinya periset ikut aktif dalam menentukan jenis data yang diinginkan. Peneliti langsung mencari data dari sumber yang digunakan dan memilih data yang sesuai dengan kategori yang dipilih yaitu berita tentang

korupsi di sektor publik Indonesia. Karena itu penelitian kualitatif bersifat subjektif dan desain riset dapat berubah atau disesuaikan dengan perkembangan riset.

3.4 Sumber Data dan Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data dari surat kabar dan literature. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan konten analisis untuk menyaring data media online yang memberitakan berita tentang kecurangan di sektor publik atau kita kenal tindakan korupsi lewat satu surat kabar terbaik di indonesia menurut Internasional Media and *Newspapers* dalam kategori Top 100 Asia. Surat kabar tersebut adalah Kompas. Dimana Kompas merupakan surat kabar Indonesia yang meraih peringkat 13 dari total 100 surat kabar seluruh asia.

Data diperoleh dengan mengakses laman surat kabar tersebut dan diamati dalam jangka waktu sepanjang tahun 2017-2018. Selain itu terdapat sumber data literatur yang digunakan oleh peneliti berasal dari berbagai macam literatur yang dianggap relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan buku Neuman (2014) tentang metode penelitian sosial adalah teknik analisis isi karena penelitian ini menganalisis konten dalam bentuk dokumen yang sudah ada yaitu dengan mengumpulkan berita tentang kasus-kasus korupsi yang terjadi di dalam sektor pemerintahan Indonesia melewati pemberitaan media surat kabar terbesar di Indonesia yaitu Kompas.com.

Pemilihan media ini dikarenakan media ini merupakan media pemberitaan terbaik di Indonesia yang selalu menampilkan berita dari segala daerah di Indonesia dan sering diakses masyarakat. Berita-berita kasus korupsi ini dikumpulkan dengan mengakses situs berita tersebut sepanjang tahun 2017-2018. Data kemudian digabungkan dan dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori yang sudah dipilih.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, karena data yang dikumpulkan berupa data dalam bentuk kata-kata (Sekaran & Bougie, 2017).

Tiga langkah dalam analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data mengacu pada proses memilih, mengodekan, dan mengategorikan data. Penyajian data merujuk pada cara menunjukkan/menyajikan data, yaitu dengan cara terorganisasi dan singkat. Langkah yang terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu menjawab pertanyaan penelitian dengan menentukan apa yang diwakili oleh tema yang teridentifikasi dengan mempertimbangkan penjelasan untuk pola dan hubungan yang diteliti atau dengan membuat kontras dan perbandingan (Sekaran & Bougie, 2017).

3.6 Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Oleh karena itu peneliti harus memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperolehnya. Cara

pengumpulan data yang beragam tekniknya harus sesuai dan tepat untuk menggali data yang benar-benar diperlukan bagi penelitian. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Menurut Lincoln dan Guba (1985) dalam Leavy (2014), terdapat empat aspek dalam menilai kualitas penelitian kualitatif, yaitu kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

1. Kepercayaan (*Credibility*)

Kepercayaan (*credibility*) merupakan unsur-unsur yang memungkinkan orang lain untuk mengenali pengalaman yang terkandung dalam penelitian melalui interpretasi pengalaman peneliti, memeriksa keterwakilan data secara keseluruhan, pemeriksaan anggota yang melibatkan kembali peneliti untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti adalah representasi akurat dari pengalaman penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai dokumen untuk meningkatkan derajat kepercayaan penelitian. Peneliti menggunakan berbagai penelitian terdahulu yang berhubungan dengan fraud pada sektor publik dan jurnal yang menjadi landasan dalam menganalisis pola komunikasi pada media surat kabar online.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Menurut Lincoln dan Guba (1985) dalam Leavy (2014), keteralihan merupakan kemampuan untuk mentransfer hasil penelitian dari satu kelompok ke kelompok lain atau deskripsi yang digunakan untuk memberikan informasi kontekstual yang terperinci kepada pembaca. Dalam penelitian ini, untuk memenuhi keteralihan (*transferability*) peneliti melakukan uraian secara teliti,

rinci, jelas, dan dapat dipercaya mengenai obyek penelitian, permasalahan yang diteliti, dan sistematika dalam setiap pembahasan dari hasil yang didapat.

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Menurut Lincoln dan Guba (1985) dalam Leavy (2014), kebergantungan dapat tercapai ketika peneliti memiliki rekan-rekan yang berpartisipasi dalam proses analisis. Dalam penelitian ini, uji kebergantungan dilakukan oleh dosen pembimbing dengan cara mengaudit setiap proses dalam penelitian selama penelitian dilaksanakan.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Menurut Lincoln dan Guba (1985) dalam Leavy (2014), uji kepastian merupakan sikap kritis terhadap diri sendiri pada bagian dari penelitian tentang bagaimana prasangka sendiri dapat mempengaruhi penelitian. Peneliti merupakan pihak yang subjektif, untuk itu peneliti membutuhkan rekan dalam penelitian agar penelitian tersebut menjadi objektif. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing sebagai pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman menjadi pihak ketiga yang mengaudit selama proses penelitian, hingga kesimpulan dapat dicapai dan melakukan persetujuan terhadap penelitian yang dilakukan.

BAB IV

ANALISI DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan memaparkan hasil temuan dari fokus penelitian ini yaitu berita-berita kasus korupsi di sektor pemerintahan Indonesia melalui pengumpulan data yang telah dikumpulkan melalui berita di surat kabar Kompas.com sepanjang tahun 2017. Penulis juga akan memberikan pembahasan dan penjelasan atas hasil analisis dari data tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti (Kountur, 2007). Dengan melakukan penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif maka peneliti harus memaparkan, menjelaskan, menggambarkan data yang diperoleh oleh peneliti melalui pengumpulan data yang sudah dilakukan.

4.1 Profil Kompas.com

Kompas.com merupakan situs berita terpercaya di Indonesia. Hak cipta dan merek dagang Kompas.com dimiliki oleh PT Kompas Cyber Media, salah satu unit usaha Kompas Gramedia. Awalnya, Kompas.com berdiri pada tahun 1997 dengan nama Kompas *Online*. Saat itu, Kompas Online hanya berperan sebagai edisi internet dari Harian Kompas. Kemudian pada tahun 1998 Kompas Online mengganti namanya menjadi Kompas.com dan mulai berfokus pada pengembangan isi, desain, dan strategi pemasaran yang baru. Sejak saat itulah

Kompas.com memulai langkahnya sebagai portal berita terpercaya di Indonesia (Kompas,2018).

Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 2008 Kompas.com tampil dengan perubahan penampilan yang signifikan. Mengusung ide “*Reborn*”, Kompas.com membawa logo, tata letak, hingga konsep baru di dalamnya. Menjadi lebih kaya, lebih segar, lebih elegan dan tentunya tetap mengedepankan unsur *user-friendly* dan *advertiser-friendly*.



Sinergi ini menjadikan Kompas.com sebagai sumber informasi lengkap, yang tidak hanya menghadirkan berita dalam bentuk teks, namun juga gambar, video, hingga live streaming. Perubahan ini pun mendorong bertambahnya pengunjung aktif Kompas.com di awal tahun 2008 yang mencapai 20 juta pembaca aktif per bulan, dan total 40 juta page views/impression per bulan. Saat ini, Kompas.com telah mencapai 120 juta *pageview* perbulan.



Pada tahun tersebut juga mulai ditampilkan channel-channel atau kanalkanal di halaman depan Kompas.com. Kanal-kanal ini didesain sesuai dengan tema berita dan membuat setiap pengelompokan berita memiliki karakter. Kanalkanal tersebut antara lain adalah:

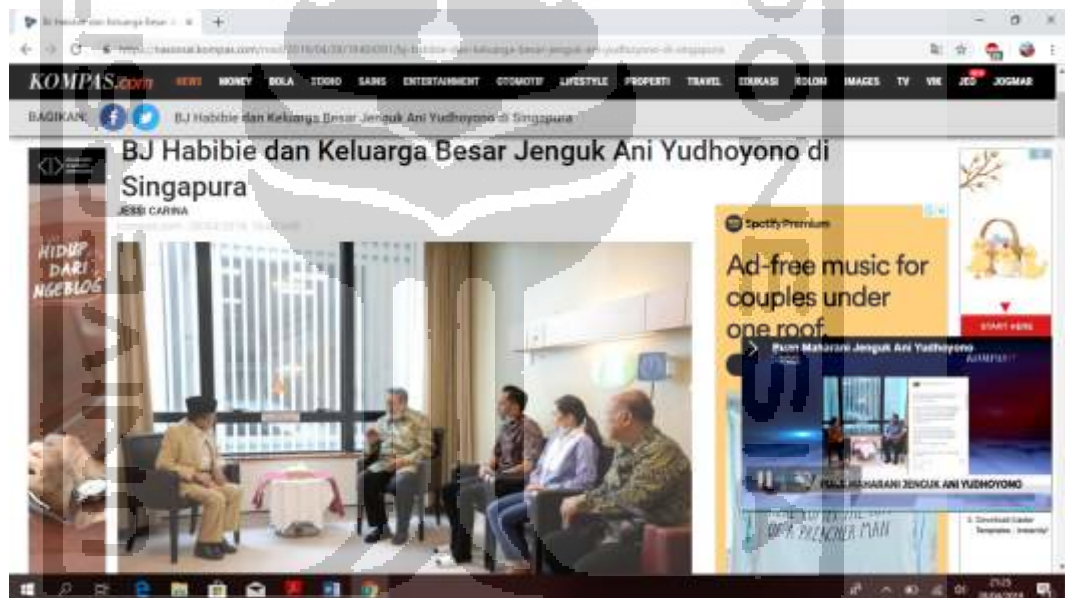
1. KOMPAS *Female* memuat informasi seputar dunia wanita: tips-tips seputar karier, kehamilan, trik keuangan serta informasi belanja
2. KOMPAS Bola tempat akurat untuk mengetahui update skor, berita seputar tim dan pertandingan sepak bola.
3. KOMPAS *Health* berisi tips-tips dan artikel tentang kesehatan, informasi medis terbaru, beserta fitur informasi kesehatan interaktif.
4. KOMPAS Tekno mengulas gadget-gadget terbaru di pasaran, menampilkan review produk dan beragam berita teknologi.
5. KOMPAS *Entertainment* menyajikan berita-berita selebriti, ulasan film, musik dan hiburan dalam dan luar negeri.

6. KOMPAS Otomotif menampilkan berita-berita seputar kendaraan, trend mobil dan motor terbaru serta tips-tips merawat kendaraan.
7. KOMPAS Properti memuat direktori lengkap properti dan artikel tentang rumah, apartemen serta tempat tinggal.
8. KOMPAS *Images* menyajikan foto-foto berita berkualitas dalam resolusi tinggi hasil pilihan editor foto Kompas.com.
9. KOMPAS *Karier Kanal* yang tak hanya berfungsi sebagai direktori lowongan kerja, namun juga sebagai *one-stop career solution* bagi para pencari kerja maupun karyawan.

Kompas.com juga telah menciptakan komunitas menulis dengan konsep citizen journalism dalam Kompasiana. Setiap anggota Kompasiana dapat mewartakan peristiwa, menyampaikan pendapat dan gagasan serta menyalurkan aspirasi dalam bentuk tulisan, gambar ataupun rekaman audio dan video. Kompasiana juga melibatkan kalangan jurnalis Kompas Gramedia dan para tokoh masyarakat, pengamat serta pakar dari berbagai bidang, keahlian dan disiplin ilmu untuk ikut berbagi informasi, pendapat dan gagasan. Kompasiana, yang setiap hari melahirkan 300 hingga 400 tulisan telah berhasil membangun komunitas jurnalisme warga yang mencapai 50.000.

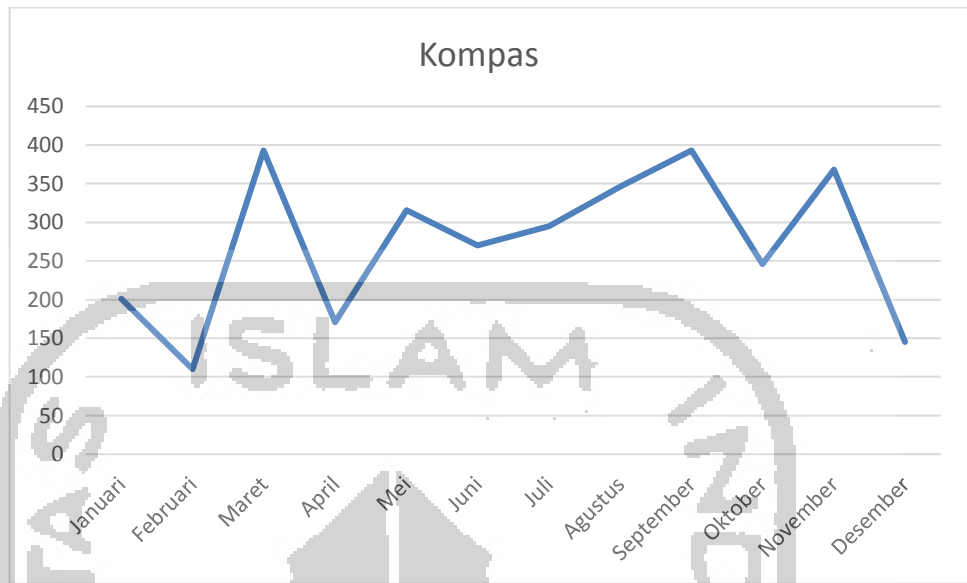
Sebagai portal berita yang mengikuti perkembangan teknologi terkini, kini selain bisa diakses melalui *handphone* atau dapat diunduh sebagai aplikasi gratis di *smartphone* BlackBerry, Kompas.com juga tampil dalam format iPad dan akan terus tumbuh mengikuti teknologi yang ada.

Pada tahun 2013, Kompas.com kembali melakukan perubahan yaitu, tampilan halaman yang lebih rapi dan bersih serta fitur baru yang lebih personal. Setiap orang memiliki preferensi dan kebutuhan berita yang berbeda. Kompas.com mencoba memahami kebutuhan pembaca yang beragam dengan menghadirkan fitur Personalisasi. Jadi, pembaca dapat dengan mudah memilih sendiri berita apa yang ingin mereka baca. Pada tahun 2016, Kompas.com berhasil masuk kategori 2016 *Newspaper Web Rankings / Asia* dalam *Top 100 Newspapers in Asia* dan menduduki peringkat 13 (www.4imn.com,2017).

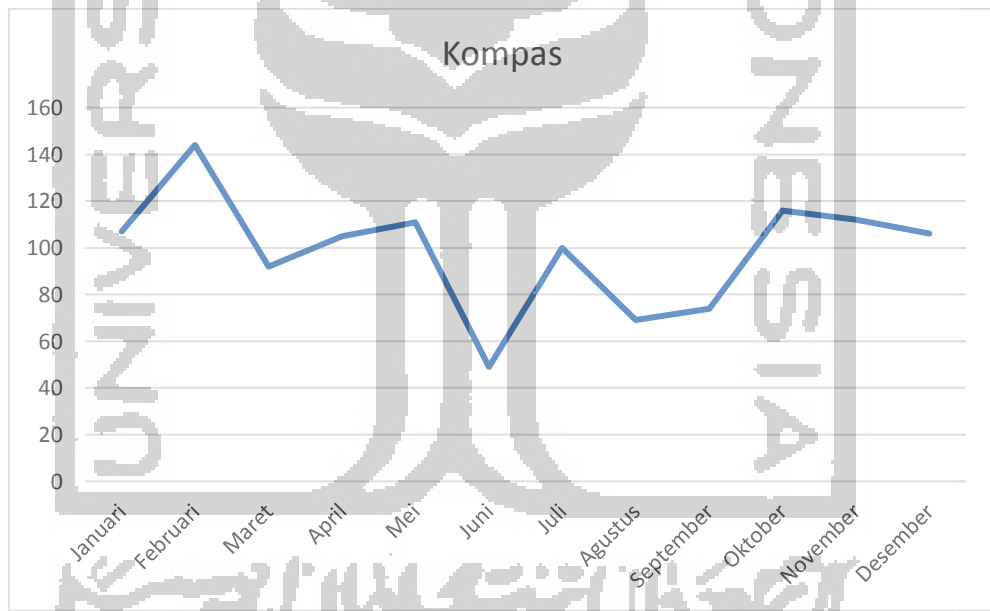


4.2 Hasil Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah berita selama tahun 2017-2018 berdasarkan jenis-jenis kecurangan yang sudah dipilih. Pendistribusian tiap kecurangan atau disini lebih mengacu pada kasus korupsi pada sektor pemerintahan Indonesia ditunjukkan pada lima tabel yang masing-masing memperlihatkan hasil dari pengumpulan dan pengkelompokkan data yang dilakukan peneliti.



Gambar 4. Grafik berita selama tahun 2017 di Kompas.



Gambar 4.1 Grafik berita selama tahun 2018 di Kompas

4.2.1 Distribusi Surat Kabar untuk Kecurangan pada Sektor Pemerintahan

Berdasarkan Bulan

Tabel 4.3
Distribusi surat kabar untuk kecurangan
pada sektor pemerintahan berdasarkan bulan tahun 2017

Bulan	Surat Kabar Kompas
Januari	201
Februari	110
Maret	393
April	171
Mei	316
Juni	270
Juli	295
Agustus	346
September	393
Oktober	246
November	368
Desember	145
Total	3254

Tabel 4.4
Distribusi surat kabar untuk kecurangan
pada sektor pemerintahan berdasarkan bulan tahun 2018

Bulan	Surat Kabar Kompas
Januari	107
Februari	144
Maret	92
April	105
Mei	111
Juni	49
Juli	100
Agustus	69
September	74
Oktober	116
November	112
Desember	106
Total	1185

Pada tabel 4.3 merupakan pendistribusian berita kasus korupsi di surat kabar Kompas.com berdasarkan bulan beredarnya berita tersebut. Berita dikumpulkan setiap hari dalam satu tahun dengan dikelompokkan perbulannya. Kemudian semua berita yang terkumpul di kelompokkan lagi ke beberapa bagian. Pada tabel pertama ini menunjukkan bahwa berita korupsi tertinggi diberitakan pada bulan Maret dan September yaitu ada 393 berita dibandingkan dengan pemberitaan kasus korupsi terendah pada bulan Februari ada 110 berita. Dari total pemberitaan mengenai tindak kecurangan yang terjadi pada sektor pemerintahan Indonesia pada tahun 2017 ada sebanyak tiga ribuan berita.

Pada table 4.4 merupakan pendistribusian berita kasus korupsi di surat kabar Kompas.com berdasarkan bulan beredarnya berita tersebut. Berita dikumpulkan dengan cara yang sama sehingga dapat menunjukkan bahwa berita korupsi tertinggi diberitakan pada bulan Februari yaitu 144 berita dibandingkan dengan pemberitaan kasus korupsi terendah pada bulan Juni ada 49 berita. Dari total pemberitaan mengenai tindak kecurangan yang terjadi pada sector pemerintahan Indonesia pada tahun 2018 ada sebanyak 1185.

Pada tahun 2017 kasus yang non-stop diberitakan yaitu kasus e-KTP dimana pada bulan Maret dan September merupakan puncak dari frekuensi pemberitaan tentang kecurangan juga memberitakan tentang kasus tersebut, pada bulan maret terdapat sebanyak 278 berita dan untuk bulan September ada sebanyak 195 berita yang memberitakan kasus e-KTP karena ternyata melibatkan sejumlah nama besar dan pejabat tinggi di pemerintahan Indonesia.

Pada Tahun 2018 kasus e-KTP juga masih diberitakan dan termasuk berita yang masih populer antara bulan Januari sampai dengan bulan April karena tersangka yang juga merupakan tokoh yang cukup terkenal di Indonesia yaitu Setya Novanto sudah di tangkap sejak oktober tahun 2017 namun masih melibatkan beberapa nama lain dan juga keluarganya. Disamping kasus tersebut ada kasus lain yang menyita perhatian public pada tahun 2018 yaitu kasus Gratifikasi yang dilakukan para pejabat di berbagai daerah.

Gubernur jambi yakni Zumi Zola yang terjerat dalam beberapa kasus suap, korupsi dan juga gratifikasi sangat menyita perhatian, sepanjang tahun 2018 nama Zumi Zola selalu muncul dalam pemberitaan. Puncaknya pada bulan Oktober terdapat 96 berita yang memberitakan kasus Gubernur Jambi tersebut, Zumi menerima gratifikasi sebesar lebih dari Rp 40 miliar. Zumi juga menerima 177.000 dollar Amerika Serikat dan 100.000 dollar Singapura. Selain itu, Zumi menerima 1 unit Toyota Alphard dari kontraktor. Dalam kasus ini, Zumi juga terbukti menyuap 53 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, serta menyuap para anggota Dewan senilai total Rp 16,34 miliar.

Pada bulan Mei sampai dengan September berita yang paling banyak diberitakan dan cukup menyita perhatian publik adalah berita kasus korupsi proyek PLTU-Riau yang melibatkan direktur Perencanaan Korporat PT PLN Syofvi Felienty Roekman, Senior Vice President Legal Corporate PT PLN Dedeng Hidayat, mantan pejabat PT PLN Nicke Widyawati yang saat ini menjadi Direktur Utama PT Pertamina dan lain-lain. Eni dan Idrus telah divonis bersalah menerima suap Rp 4,75 miliar dari pemilik saham Blackgold Natural Resources

Johannes Budisutrisno Kotjo. Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta menyatakan Eni dan Idrus menerima suap untuk membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU Riau-1. Eni berperan memfasilitasi pertemuan antara Kotjo dengan Sofyan Basir. Sidang pembacaan dakwaan dalam perkara suap proyek PLTU Riau-dilakukan pada 4 Oktober 2018, Sidang akan berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan sampai sekarang masih berlangsung.

Kemudian ada Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa yang juga terkena kasus pencucian uang. Pada perkara pertama, Mustofa diduga terlibat dalam dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015. Pada perkara kedua, Mustofa serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto Zainal Abidin periode 2010-2015 diduga secara bersama-sama menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, dari penerimaan gratifikasi sebesar Rp 34 miliar, ditemukan adanya dugaan pencucian uang. Mustofa juga diduga menempatkan, menyimpan dan membelanjakan hasil penerimaan gratifikasi, berupa uang tunai Rp 4,2 miliar, kendaraan roda empat sebanyak 30 unit atas nama pihak lain.

4.2.2 Distribusi Kasus Kecurangan Berdasarkan Jenis-Jenis Kecurangan

Tabel 4.5
Distribusi kasus kecurangan berdasarkan jenis-jenis kecurangan tahun 2017

Jenis-jenis <i>Fraud</i>	Surat Kabar Kompas
1	3181
2	25
3	48
Total	3254

Tabel 4.6
Distribusi kasus kecurangan berdasarkan jenis-jenis kecurangan tahun 2018

Jenis-jenis <i>Fraud</i>	Surat Kabar Kompas
1	1147
2	15
3	23
Total	1185

Adapun jenis kasus kecurangan atau penipuan yang melibatkan layanan publik yang diberitakan oleh surat kabar, penelitian ini telah mengkategorikan jenis-jenis kecurangan ke dalam tiga bentuk kecurangan yaitu Korupsi, Penyalahgunaan Aset dan Lain-Lain. Korupsi disini adalah perilaku tidak jujur oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan sering kali melibatkan tindakan yang tidak terlegitimasi, tidak bermoral, atau tidak kompatibel dengan standar etis. Ada beberapa jenis korupsi contohnya adalah penyuapan dan persekongkolan tender. Penyalahgunaan aset disini adalah pencurian aset perusahaan atau lembaga oleh pegawainya dengan berbagai cara seperti penggelapan dana perusahaan. Untuk penelitian sebagian besar kasus yang diberitakan merupakan jenis kecurangan

tindak pidana korupsi diikuti kasus yang dengan jenis fraud Lain-Lain kemudian jenis fraud penyalahgunaan aset.

Pada table 4.5 dapat dilihat hasil dari pengumpulan data yang telah dilakukan tahun 2017 , terdapat sebanyak 3.012 atau 97,7 % berita yang masuk dalam jenis *fraud* korupsi. Untuk jenis penyalahgunaan aset ada sebanyak 25 atau 0,76% berita dan terakhir untuk berita yang di kategorikan lain-lain ada sebanyak 48 atau 1,47% berita sepanjang tahun 2017.

Sedangkan pada table 4.6 dapat dilihat hasil dari pengumpulan data yang telah dilakukan tahun 2018, terdapat sebanyak 1147 atau 96,7% berita yang masuk dalam jenis *fraud* korupsi. Untuk jenis penyalahgunaan aset ada sebanyak 15 atau 1,26% berita dan terakhir untuk berita yang di kategorikan lain-lain ada sebanyak 23 atau 1,94% berita sepanjang tahun 2018.



4.2.3 Distribusi Surat Kabar untuk Kecurangan Berdasarkan Daerah di Indonesia

Tabel 4.7
Distribusi surat kabar untuk kecurangan berdasarkan daerah di Indonesia tahun 2017

Kota	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Jakarta	2712	18	45	2775
Bengkulu	50			50
Malang	45			45
Maluku	41			41
Pamekasan	38			38
Kutai Kartanegara	25			25
Cilegon	25			25
Mojokerto	24			24
Tegal	23			23
Nganjuk	20			20
Sumatera Utara	20			20
Banten	16			16
Manado	15			15
Klaten	13			13
Jambi	13			13
Buton	11			11
Madiun	11			11
Banjarmasin	9			9
Sulawesi Tenggara	9			9
Sumatra Barat	8			8
Jawa Tengah	3			3
Papua	6			6
Jawa Timur	6			6
Komawe	7			7
Riau	6			6
NTB	3			3
Cimahi	6			6
Halmahera Timur	5			5
Bali	1			1
Kebumen	2			2
Aceh Barat		1		1
Dumai	2			2
Subang	1			1
Surakarta	2			2
Surabaya		2		2
Total	3188	21	45	3254

Keterangan: 1- korupsi
2-Penyalahgunaan Aset
3 -Lain-Lain

Tabel 4.8
Distribusi surat kabar untuk kecurangan berdasarkan daerah di Indonesia tahun 2018

Kota	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Jakarta	714	15	23	752
Jambi	39			39
Jawa Timur	37			37
Buton	36			36
Mojokerto	35			35
Kutai Kartanegara	29			29
Riau	27			27
Jawa Tengah	26			26
Kebumen	22			22
Sulawesi Tenggara	23			23
Sumatera Utara	19			19
Hulu Sungai	23			23
Maluku	14			14
Malang	12			12
Bengkulu	11			11
Sulawesi Utara	5			5
Banjarmasin	3			3
Kalimantan Tengah	6			6
Banten	4			4
Sumatera Barat	5			5
Surabaya	7			7
NTT	6			6
Bener Meriah (Aceh)	1			1
Jepara	2			2
Halmahera Timur	5			5
Subang	4			4
Nganjuk	4			7
Labuhan Batu	4			4
Cianjur	5			5
Cirebon	7			7
Madiun	6			6
Pasuruan	2			2
Papak Bharat (Sumtara Utara)	2			2
Papua	1			1
Ngada	1			1
Total	1147	15	23	1185

Keterangan: 1- korupsi
2-Penyalahgunaan Aset
3 -Lain-Lain

Pada table 4.7 ini memperlihatkan bagaimana kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia berdasarkan daerah atau kota yang tersangkut kasus korupsi. Sebagaimana dari hasil pengumpulan berita sepanjang tahun 2017 yang paling banyak diberitakan adalah kasus e-KTP yang terjadi di pemerintahan pusat yaitu Jakarta. Dari tabel bisa dilihat untuk kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia yaitu ada 2,775 berita karena kebanyakan berita kasus korupsi bertingkat pemerintahan pusat sehingga berita-berita tersebut dimasukkan ke kota Jakarta.

Sedangkan pada table 4.8 memperlihatkan bagaimana kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia berdasarkan daerah atau kota yang tersangkut kasus korupsi juga. Namun tidak ada perbedaan yang signifikan karena hampir sama dengan tahun 2017 kasus yang banyak diberitakan adalah kasus e-KTP dan terjadi di pemerintahan pusat yaitu Jakarta. Namun berita mengenai Gubernur Jambi Zumi Zola juga tidak sedikit diberitakan terkait kasusnya yang terjerat kasus suap, korupsi dan gratifikasi, disusul kota Mojokerto dengan kasus yang hampir serupa yaitu pencucian uang sebanyak Rp 34 miliar yang diduga bersumber dari hasil gratifikasi. Sehingga mantan Bupati Mojokerto tersebut, divonis 8 tahun penjara dalam perkara suap perizinan menara telekomunikasi di Mojokerto. Majelis hakim juga mewajibkan terdakwa membayar denda Rp 500 juta subsidi 3 bulan penjara.

Dari kedua tabel di atas terdapat beberapa daerah yang mengalami penurunan juga kenaikan dalam pemberitaan media mengenai tindak kecurangan sektor publik yaitu: Jakarta mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 2775 berita turun menjadi 752 berita pada tahun 2018, Jawa Tengah mengalami

kenaikan dari tahun 2017 sebesar 3 berita menjadi 26 berita pada tahun 2018, Maluku mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 41 berita menjadi 14 berita pada tahun 2018, Jawa Timur mengalami kenaikan dari 2017 sebesar 6 berita menjadi 37 berita pada tahun 2018, Jambi mengalami kenaikan dari 2017 sebesar 13 berita menjadi 39 berita dan masih banyak lagi daerah-daerah yang mengalami hal serupa.



4.2.4 Distribusi Surat Kabar untuk Kecurangan Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

Tabel 4.9
Distribusi surat kabar untuk kecurangan berdasarkan tingkat pemerintahan

Tingkat Yuridiksi	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Pusat	2712	18	45	2775
Daerah	476	3		479
Total	3188	15	23	3254

Keterangan:

- 1- korupsi
- 2- Penyalahgunaan Aset
- 3 -Lain-Lain

Tabel 4.10
Distribusi surat kabar untuk kecurangan berdasarkan tingkat pemerintahan

Tingkat Yuridiksi	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Pusat	714	15	23	752
Daerah	433			433
Total	1147	15	23	1185

Keterangan :

- 1- korupsi
- 2- Penyalahgunaan Aset
- 3 -Lain-Lain

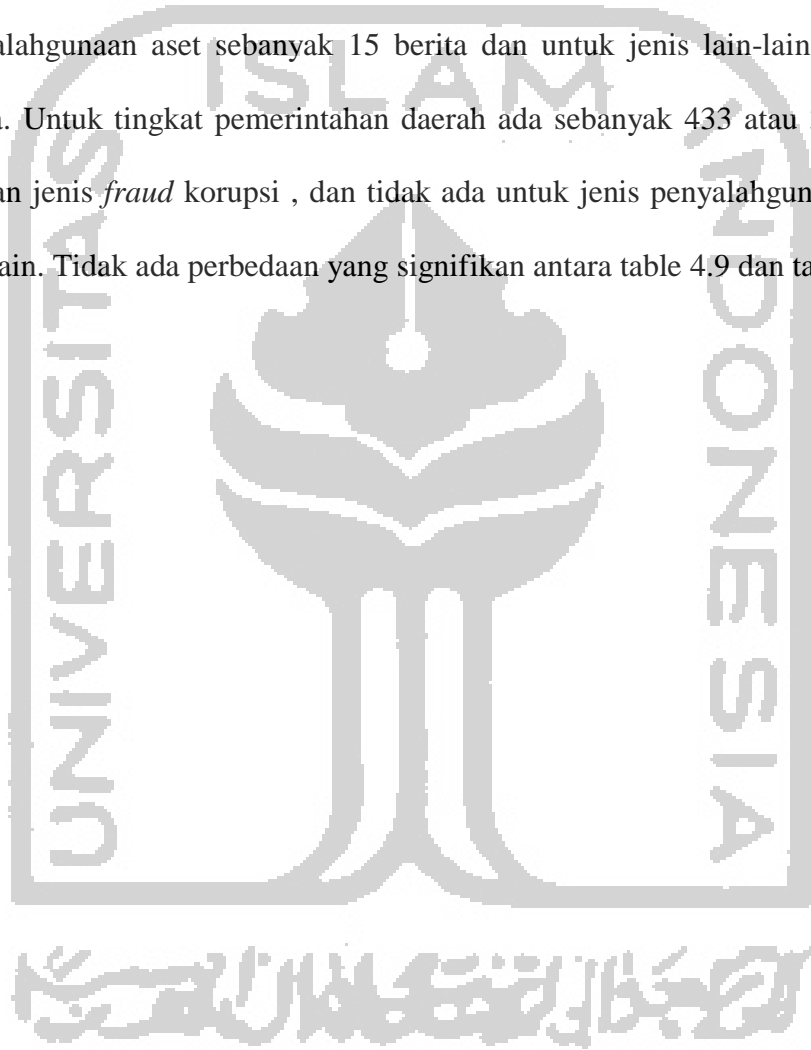
Sistem pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Presiden dengan dibantu seorang Wakil Presiden dan menteri-menteri negara. Sebagai lembaga legislatif pemerintahan pusat adalah DPR dan MPR.

Pemerintahan ini berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia, yang saat ini adalah DKI Jakarta. Pemerintahan daerah adalah organisasi pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah menurut asas otonomi seluasluasnya dan asas perbantuan dalam sistem NKRI. Penyelenggara pemerintahan daerah mencakup gubernur, bupati, walikota, dan perangkatan lainnya (kepala dinas, kepala badan, dan unit-unit kerja lain yang diatur oleh Sekretaris Daerah). Lembaga Legislatif yang berada di daerah, yaitu DPRD I untuk tingkat provinsi dan DPRD II untuk tingkat kabupaten dan walikota.

Pada tabel 4.9 dapat dilihat untuk tingkat pemerintahan pusat ada 2,712 atau 83,3 % dari total berita dengan jenis fraud korupsi, untuk jenis *fraud* penyalahgunaan aset sebanyak 18 berita dan untuk jenis lain-lain sebanyak 45 berita. Untuk tingkat pemerintahan daerah ada sebanyak 476 atau 14,6 % berita dengan jenis *fraud* korupsi, untuk yang termasuk jenis penyalahgunaan aset ada 3 berita saja dan tidak ada untuk jenis lain-lain. Jadi bisa dikatakan mayoritas kasus-kasus korupsi yang terjadi sepanjang tahun 2017 ini adalah pemerintahan pusat yang banyak terlibat dalam kasus korupsi. Dan tidak sedikit tokoh pemerintahan yang terlibat korupsi. Hal ini jadi gambaran seperti apa sebenarnya kinerja para pejabat negara yang sudah di beri amanah oleh masyarakat untuk mengurus negara kita. Walaupun tidak semua pejabat atau tokoh pemerintahan yang terlibat kasus korupsi tetapi tidak sedikit pula yang ikut serta dalam melakukan tindak kecurangan korupsi ini. Mayoritas kasus-kasus korupsi yang ada dilakukan berkelompok sehingga tidak sedikit yang terlibat dalam satu kasus korupsi

contohnya kasus e-KTP yang ternyata banyak sekali pejabat dan oknumoknum yang terlibat didalamnya.

Sedangkan pada table 4.10 untuk tingkat pmerintahan pusat ada 714 atau 60,2% dari total berita dengan jenis *fraud* korupsi, untuk jenis *fraud* penyalahgunaan aset sebanyak 15 berita dan untuk jenis lain-lain sebanyak 23 berita. Untuk tingkat pemerintahan daerah ada sebanyak 433 atau 36,5 % berita dengan jenis *fraud* korupsi , dan tidak ada untuk jenis penyalahgunaan asset dan lain-lain. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara table 4.9 dan table 4.10.



4.2.5 Distribusi Surat Kabar untuk Kecurangan Berdasarkan Departemen-Departemen

Tabel 4.11
Distribusi surat kabar untuk kecurangan berdasarkan Departemen-departemen tahun 2017

No	Departemen-departemen	Frekuensi
1	Kasus E-KTP (Kemendagri)	1673
2	Ditjen Pajak	71
3	Badan Keamanan Laut	57
4	DPR RI	31
5	Pemerintahan Kutai Kartanegara	20
6	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR)	57
7	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	17
8	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	7
9	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kebumen	5
10	Garuda Indonesia	45
11	Pertamina	8
12	PT PAL Indonesia	23
13	Pelindo II	3
14	Asuransi Jasindo	2
15	PT Garam	7
16	PT KAI	2
17	Perusahaan Listrik Negara (PLN)	2
18	Mahkamah Konstitusi	213
19	Perusahaan Umum Perhutani (Berdikari) Jawa Tengah	12
20	DPD RI	8
21	Ditjen P2KTrans Kementerian Tenaga Kerja	17
22	Menteri Kesehatan	71
23	Pemerintahan Provinsi DKI (Podomoro land)	14
24	Otorisasi Jasa Keuangan (OJK)	8
25	Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan	5
26	Menteri Pemuda dan Olahraga(Hambalang)	21
27	Pemerintahan Daerah Madiun	15
28	Menteri Pertanian	11
29	Mahkamah Agung	6
30	Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	9
31	Kepala Kejaksaan Negeri Praya	3
32	Pemerintahan Daerah Cimahi	6
33	Pemerintahan Daerah Pamekasan	35

34	Dinas Pekerjaan Umum Papua	7
35	Atase Imigrasi	11
36	Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan	9
37	Pemerintahan Daerah Riau	5
38	Lain- Lain	54
39	Pemerintahan Daerah Tanggamus	5
40	Pemerintahan Daerah Klaten	22
41	Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat	4
42	Pemerintahan Daerah Nganjuk	10
43	Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara	25
44	Pemerintahan Provinsi Banten	25
45	Rumah Sakit Udayana	11
46	Kejaksaan Agung	18
47	Perlindungan Hortikultura Kementerian	5
48	Pertanian	1
49	Asian Games (INASGOC)	6
50	POLRI	44
51	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)	3
52	Kwarda Pramuka DKI Jakarta	50
53	Ditjen Binmas Islam Kementerian Agama	21
54	Tentara Nasional Indonesia(TNI)	68
55	Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia	22
56	Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi (PDTT)	22
57	Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	10
58	Kejaksaan Tinggi Bengkulu	18
59	Bank Pembangunan Daerah Papua	32
60	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang JATIM	45
61	Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara	32
62	Pemerintahan Daerah Malang	35
63	Kementrian Desa	24
64	Kementerian Hubungan	12
65	Pemerintahan Kota Tegal	9
66	Mahkamah Agung	22
67	PDAM Banjarmasin	10
68	Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	3
69	Kementerian Dalam Negeri	70
	Total	3254

Tabel 4.12

Distribusi surat kabar untuk kecurangan berdasarkan Departemen-departemen tahun 2018

No	Departemen-departemen	Frekuensi
1	Kasus E-KTP (Kemendagri)	316
2	Pemerintah Provinsi Jambi	173
3	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR)	14
4	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kebumen	22
5	Garuda Indonesia	16
6	Perusahaan Listrik Negara (PLN)	53
7	DPD RI	35
8	Otorisasi Jasa Keuangan (OJK)	21
9	Pemerintahan Daerah Riau	52
10	Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara	24
11	Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia	29
12	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)	13
13	Kementerian Dalam Negeri	7
14	Pemerintahan Kota Cirebon	12
15	Kementerian Luar Negeri	4
16	Pemerintah Kutai Kertanegara	26
17	Pemerintah Daerah NTT	8
18	Pemerintah Provinsi DKI (Podomoro Land)	22
19	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	27
20	Pemerintah daerah Ngada	4
21	Pemerintah Daerah subang	7
22	DPR RI	32
23	Kementerian Hubungan	5
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang JATIM	43
25	Pemerintah Provinsi Papua	2
26	Pemerintahan Provinsi Maluku	17
27	Pemerintahan Provinsi Bengkulu	28
28	POLRI	4
29	Pemerintah Daerah Hulu Sungai	5
30	Lain-lain	51
31	Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara	24
32	Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara	21
33	Kejaksaan Tinggi Tangerang	23
34	Pemerintahan Daerah Bener Meriah	12
35	Pemerintah Daerah Pakpak Bhener	11
36	Pemerintah Provinsi Sumatra Barat	22
	Total	1185

Berita yang dikumpulkan juga kemudian dikelompokkan berdasarkan departemen yang terlibat dalam pemberitaan kasus-kasus yang ada. Setelah pengumpulan data dilakukan, terkumpul sebanyak 69 departemen di pemerintahan Indonesia pada tahun 2017 dan 36 departemen pada tahun 2018. Pada tabel 4.11 dan table 4.12 ini memperlihatkan departemen-departemen atau pihak-pihak yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi di Indonesia. Peringkat pertama yang paling banyak diberitakan yaitu Kementerian Dalam Negeri untuk kasus e-KTP. Karena proyek e-KTP itu sendiri merupakan proyek yang diselenggarakan oleh Kemendagri dan dipercayakan ke beberapa departemen lainnya. Tetapi sayangnya disalahgunakan oleh beberapa departemen yang terlibat dalam proyek e-KTP ini.

Kemudian untuk departemen kedua pada tahun 2017 yang paling banyak terlibat kasus korupsi yaitu Mahkamah Konstitusi. Ada dua hakim yang terlibat kasus korupsi di Mahkamah Konstitusi ini yaitu Akil Mochtar dan Patrialis Akbar. Akil Mochtar terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menerima hadiah dan tindak pidana pencucian uang terkait kasus sengketa pilkada di MK yaitu pilkada Kabupaten Gunung Mas (Rp 3 miliar), Kalimantan Tengah (Rp 3 miliar), Pilkada Lebak Banten (Rp 1 miliar), Pilkada Empat Lawang (Rp 10 miliar dan 500.000 dollar AS), serta Pilkada Kota Palembang (sekitar Rp 3 miliar).

Sedangkan pada tahun 2018 departemen kedua yang paling banyak terlibat kasus yaitu pemerintah Provinsi Jambi yaitu Gubernur jambi yakni Zumi Zola yang terlibat kasus korupsi, suap dan gratifikasi. Zumi Zola terbukti bersalah secara sah setelah menerima gratifikasi sebesar lebih dari Rp 40 miliar. Zumi juga

didakwa menerima 177.000 dollar Amerika Serikat, 100.000 dollar Singapura, dan satu unit Toyota Alphard.

4.3 Kasus Korupsi Yang Dilakukan Para Kepala Daerah

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah mengatakan salah satu penyebab maraknya kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah adalah pengawasan di tingkat daerah yang tidak efektif. KPK berharap inspektorat tidak lagi segan dan tidak terhambat lagi untuk mengawasi wali kota atau bupati. Sebab, undang-undang mengatur status mereka independen dan bertanggung jawab bukan kepada atasan langsung, dalam hal ini wali kota atau bupati. Dari 105 kepala daerah yang kasusnya tengah ditangani KPK, 60 orang di antaranya terilit kasus suap, sementara sisanya terkait kasus yang merugikan keuangan negara, gratifikasi, hingga pemerasan. Masalah perizinan dianggap kerap menjadi batu sandungan para kepala daerah yang akhirnya terjerembap ke dalam kasus korupsi.

Selain Kasus e-KTP yang disoroti sepanjang tahun 2017 hingga hampir pertengahan 2018, kasus baru muncul yakni OTT para kepala daerah di berbagai penjuru daerah di Indonesia. Namun yang sangat menjadi daya Tarik wartawan yaitu Gubernur Jambi Zumi Zola yang terjerat kasus korupsi, suap dan gratifikasi, Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola didakwa menerima gratifikasi sebesar lebih dari Rp 40 miliar. Zumi juga didakwa menerima 177.000 dollar Amerika Serikat, 100.000 dollar Singapura, dan satu unit Toyota Alphard. Menurut jaksa, Zumi menerima uang melalui orang dekatnya, Apif Firmansyah sebesar Rp 34,6 miliar. Kemudian, melalui Asrul Pandapotan Sihotang yang merupakan orang kepercayaan Zumi sebesar Rp 2,7 miliar, uang 147.300 dollar AS dan 1 unit

Toyota Alphard. Selain itu, menurut jaksa, Zumi menerima uang dari Arfan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemprov Jambi sebesar Rp 3 miliar dan 30.000 dollar AS serta 100.000 dollar Singapura.

Zumi Zola juga dinyatakan terbukti menyuap 53 anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 dengan total Rp 16,34 miliar sebagai 'duit ketuk palu' agar DPRD Jambi menyetujui Raperda APBD tahun anggaran 2017 dan 2018 menjadi Perda APBD 2017 dan 2018. Selain itu Zumi juga terbukti melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Pidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP Pidana. Zumi Zola menerima vonis hakim dalam perkara gratifikasi dan korupsi uang ketok palu DPRD Jambi. Hakim memvonis Zumi Zola 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan dalam perkara tersebut.

4.4 Kesimpulan

Pemberitaan berita tindak kecurangan atau kasus korupsi lebih tepatnya pada sektor pemerintahan di Indonesia sangat menyita perhatian masyarakat dan banyak yang mengikuti alur perkembangan tiap kasus yang terjadi. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Malaysia pemberitaan di Indonesia mengenai kasus-kasus kecurangan ini jauh lebih banyak dari pada pemberitaan di Malaysia. Sudah menjadi pusat perhatian di media surat

kabar Indonesia karena pengelolaan dana publik merupakan perhatian publik. Bisa dilihat dari besar frekuensi pemberitaan di Kompas ini mengenai berita korupsi yang melibatkan berbagai pihak di pemerintahan pusat maupun daerah dan tidak sedikit negara kita dirugikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan tamak atau rakus.

Itu semua terjadi karena kurangnya kesadaran yang dilakukan oleh para pelaku korupsi akan dampak yang terjadi dari lalainya mereka dalam mengemban amanah rakyat dan juga negara. Jika saja para koruptor bias benar-benar melakukan tugasnya sebagai penyambung aspirasi rakyat mungkin Indonesia sudah bias menjadi negara yang sejahtera.

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti pola dan frekuensi pemberitaan tindak kecurangan pada sektor pemerintahan Indonesia untuk tahun 2017-2018 dilihat dari penelitian sebelumnya mengalami penurunan, dimana pada tahun 2017 total pemberitaan tindak kecurangan di pemerintahan Indonesia melalui surat kabar online kompas yaitu sebesar 3254 sedangkan pada tahun 2018 sebesar 1185.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan di analisis seperti yang telah diuraikan dalam Bab Pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa didapatkan beberapa hal penting yaitu:

- 1) Pemberitaan kecurangan yang ada di sektor pemerintahan Indonesia dari tahun 2017-2018 mengalami penurunan yaitu dari 3254 berita pada tahun 2017 menjadi 1185 berita pada tahun 2018.
- 2) Kasus korupsi yang dilakukan para kepala daerah, kasus ini menjadi perhatian publik karena sepanjang tahun 2018 banyak kepala daerah yang terkena OTT oleh KPK. Dari Bupati Halmahera Utara, Bupati Kutai, Walikota Kendari dan masih banyak lagi. Adanya kesempatan yang membuat para kepala daerah ini lali dalam menjalankan amanahnya, seharusnya menjadi penyalur aspirasi masyarakat justru merugikan negara dan juga masyarakat.
- 3) Gubernur Jambi Zumi Zola yang terjerat kasus korupsi, suap dan juga gratifikasi menjadi pusat perhatian wartawan sepanjang tahun 2018 karena telah merugikan negara dan juga masyarakat dengan jumlah nominal yang cukup besar yakni hampir 100 milyar Rupiah. Bukan menjadi panutan yang baik Zumi justru membuat rakyat jambi kecewa. Namun setelah ditangkap kpk, akhirnya Zumi divonis hakim 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidi 3 bulan kurungan dalam perkara tersebut.

- 4) Bila dilihat dari distribusi berita berdasarkan daerah di Indonesia ada beberapa kota yang mengalami penurunan juga kenaikan, seperti Jakarta mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 2775 berita turun menjadi 752 berita pada tahun 2018, Jawa Tengah mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 3 berita menjadi 26 berita pada tahun 2018, Maluku mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 41 berita menjadi 14 berita pada tahun 2018, Jawa Timur mengalami kenaikan dari 2017 sebesar 6 berita menjadi 37 berita pada tahun 2018, Jambi mengalami kenaikan dari 2017 sebesar 13 berita menjadi 39 berita dan masih banyak lagi daerah-daerah yang mengalami hal serupa.

Hasil dari studi terbatas ini dapat menunjukkan integritas yang longgar di sektor pemerintah ketika kepala departemen terlibat dalam tindak korupsi dengan menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepada mereka. Pemerintah perlu memikirkan langkah-langkah efektif untuk melawan tindak kecurangan ini untuk memastikan sektor pemerintahan Indonesia diatur secara etis dan kepercayaan publik ditegakkan. Namun, hasil penelitian ini mungkin tidak digeneralisasikan karena keterbatasan jumlah sampel yang dipilih.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam proses penelitian yang dilakukan terdapat keterbatasan yang dihadapi, keterbatasan tersebut antara lain:

1. Objek penelitian berfokus terhadap tindak kecurangan korupsi, penyalahgunaan aset, dan lain-lain.
2. Sumber data yang digunakan hanya satu surat kabar online.

3. Data yang dikumpulkan masih banyak persamaan

5.3 Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan yang telah didapatkan, maka berikut ini adalah saran yang bisa peneliti sampaikan.

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa menambahkan kategori tindak kecurangannya sehingga lebih spesifik dan lebih banyak yang bias ditemukan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa menambahkan beberapa media pemberitaan sebagai sumber datanya agar ada variasi sumber data sehingga ada perbandingan pada analisis hasil pengumpulan data yang dilakukan nantinya.
3. Bagi peneliti selanjutnya bisa meregenalisis penelitian dengan menambah periode tahun pengambilan data berita berjarak 2-3 tahun. Agar kasus-kasus yang panjang bisa dianalisis sampai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd, Rauf., Yusoff, H., Othman, R., Yatim, N., Poobalan, U.R. and Che Salleh, S. 2015. *“Public Sector Accounting: Malaysian context”*. Pearson. Kuala Lumpur
- Akir, O. and Ma lie, S. 2012. *“Integrity dimension and religious orientation in aspect of employees job conduct: an exploratory model building”*, *Procardia – Social and Behavioral Sciences*, Vol. 62, pp.167 – 174.
- Ali, Nor Aishah Mohd., Abu, Nor”Asyiqin., and Hussain, Wan Shafizah. 2017. *“Profiling Fraud Committed by Public Sector Employees: Evidence from the Malaysian Media Reporting.”* p. 32-34
- Amalia, S. R. (2018). S. Ak. *Penggambaran Tindak Kecurangan Pada Sektor Publik Melalui.*
- Apriadi, Rangga. 2015. *”Determinan Terjadinya Fraud di Institusi Pemerintahan”*.Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya Malang.
- Arikunto, Suharsimi. 2001. *“Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek”*. Jakarta: Rineka Cipta
- Aziz, M.A.A., Rahman, H.A., Alam, M.M. and Said, J. 2015. *“Enhancement of the accountability of public sectors through integrity system”*, *Internal Control System and Leadership Practices: A Review Study, Procedia Economics and Finance*, Vol. 28, pp. 163-169.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Peraturan No. 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2010. *“Pedoman Teknis Fraud Control Plan (FCP)”*, Jakarta: Deputi Bidang Investigasi BPKP.
- Bologna, Jack. 1993. *“Handbook of Corporate Fraud”*. Boston: Butterworth-Heinemann.
- Cressey, Donald R. 1953. *“Other People Money, a Study in The Social Psychology of Embezzlement”*. Montclair:Patterson Smith.

- Debreceeny, R.S. and Gray, G.L. 2010. “*Data mining journal entries for fraud detection: an exploratory study*”, *International Journal of Accounting Information Systems*, Vol. 11 No. 3, pp. 157-181.
- Gbegi, D. and Adebisi, J. F. 2013. “*The new fraud diamond model – how can it help forensic accountants in fraud investigation in Nigeria?*” *European Journal of Accounting Auditing and Finance Research*, Vol. 1.
- Ermansjah Djaja. 2010. “*Memberantas Korupsi Bersama KPK*”. Jakarta, Sinar Grafika.
- Haniza Hanim, M. B., Norazida, M. and Jamaliah, S. 2017. “*Mitigating Asset Misappropriation through integrity and fraud risk elements: Evidence Emerging Economies*”. . 4, pp. 129 -138
- Herdiansyah, Haris. 2011. “*Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*”. Jakarta: Salemba Humanika.
- <https://inside.kompas.com/about-us>
- <https://www.4imn.com/about/index.htm> top4asia diakses pada 13 November 2017
- Husein, Umar., 2005. “*Metode Penelitian*”. Jakarta : Salemba Empat.
- Institute of Internal Auditors (IIA).2009. “*International Profesional Practices Framework (IPPF)*”. Altamonte Springs, Florida: IIA
- Keller and Owens. 2015.“*Preventing and detecting fraud in not-for-profit organizations*”.*Updated edition, available at:*
www.kellerowens.com/wp-content/uploads/2011/12/FraudBooklet.pdf
- Kountur, Ronny. 2007. “*Metode Penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis*”, edisi revisi. Jakarta : penerbit PPM.
- Kurohman, Taufik., Pratiwi, Ekaning., dan Adriana. 2017.“*Deteksi Kecurangan(Fraud) di Sektor Pemerintahan*”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- Kriyantono, Rachmat. 2009. “*Teknik Praktis Riset Komunikasi*”. Jakarta: Kencana.

- Levi, M. 2007. “*Policing financial crimes*”, in Pontell, H.N. and Geis, G. (Eds), International Handbook of White-Collar and Corporate Crime, Springer, New York, NY.
- Levi, M. and Burrows, J. 2008. “*Measuring the impact of fraud in the UK: a conceptual and empirical journey*”, British Journal of Criminology, Vol.48 No. 3, pp. 293-318.
- Moleong, Lexy. J. 2011. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Neuman, W.L. 2014. “*Basic Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*”, 7th Ed. Pearson Education Limited.
- Palshikar, G.K. 2002. “*The Hidden truth*”. Intelligent Enterprise.com. 28 May, pp. 46-51.
- Romney, M. B. (2014). *Accounting Information System*. Pearson Education.
- Sekaran, U., and Bougie, R. 2017. “*Metode Penelitian untuk Bisnis*”, 6th ed. Jakarta: Salemba Empat.
- suedi, B. (2010). *Suatu Perspektif tentang Klaim Mal Praktek Auditing Forensik dan Kecurangan*, Vol. 9 (2): 199-225.



Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Januari 2017

Tabel 1.1 Total Berita Bulan Januari

Bulan	Surat Kabar Kompas
Januari	201

Tabel 1.2 Jenis-Jenis *Fraud*

Jenis-jenis <i>Fraud</i>	Surat Kabar Kompas
1	181
2	15
3	5
Total	201

Tabel 1.3 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Daerah di Indonesia

Kota	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Jakarta	150	12	4	166
Jawa Tengah	2			2
Buton	10			10
Cimahi	3			3
Klaten	9			9
Kebumen	1			1
Nganjuk	2			2
Sumatera Barat	5			5
Tanggamus	1			1
Maluku	2			2
Total	185	12	4	201

Tabel 1.4 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Pemerintahan Indonesia

Tingkat Yuridiksi	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Pusat	150	12	4	166
Daerah	35			35
Total	185	15	23	201

Tabel 1.5 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Departemen-Departemen

No	Departemen-departemen	Frekuensi
1	Badan Keamanan Laut	9
2	Ditjen Pajak	5
3	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	3
4	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	1
5	Kementerian Dalam Negeri	1
6	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR)	6
7	Disdikpora Kebumen	1
8	Pupuk Perum Perhutani	2
9	Pemprov DKI	14
10	BUMN / Garuda Indonesia	25
11	Mahkamah Konstitusi	89
12	Direktur PLN	1
13	Kasus E-KTP	15
14	Pemda Cimahi	3
15	DPD RI	1
16	Ditjen P2KTrans Kementerian Tenaga Kerja	1
17	Podomoro Land	1
18	Lain-Lain	6
19	APBD Tanggamus	1
20	Pemda Klaten	9
21	Pemprov Sumatra Barat	4
22	PT. Berdikari	1
23	Pemda Nganjuk	2
	Total	201

Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Februari 2017

Tabel 2.1 Total Berita Bulan Februari

Bulan	Surat Kabar Kompas
Februari	110

Tabel 2.2 Jenis-Jenis *Fraud* Bulan Februari

Jenis-jenis <i>Fraud</i>	Surat Kabar Kompas
1	103
2	-
3	7
Total	110

Tabel 2.3 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Daerah di Indonesia

Kota	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Jakarta	80	-	7	87
Cimah	2			2
Kebumen	1			1
Sumatera Bara	3			3
Maluku	7			7
Papua	1			1
Madiun	6			6
Nusa Tenggara Barat	3			3
Total	103	0	7	110

Tabel 2.4 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Pemerintahan Indonesia

Tingkat Yuridiksi	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Pusat	80	-	7	87
Daerah	23	-	-	23
Total	103	15	23	110

Tabel 2.5 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Departemen-Departemen

No	Departemen-departemen	Frekuensi
1	Badan Keamanan Laut	1
2	Ditjen Pajak	12
3	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	2
4	DPR RI	5
5	Kementerian Dalam Negeri	1
6	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR)	6
7	Disdikpora Kebumen	1
8	Atase Imigrasi Kedubes Malay	4
9	Dinas PU Provinsi Papua	1
10	BUMN / Garuda Indonesia	11
11	Mahkamah Konstitusi	17
12	Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	5
13	Kasus E-KTP	10
14	Pemda Cimahi	2
15	DPD RI	3
16	Ditjen P2KTrans Kementerian Tenaga Kerja	3
17	Menteri Kesehatan	4
18	Lain-Lain	1
19	Otorisasi Jasa Keuangan (OJK)	2
20	Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan	1
21	Hambalang	4
22	Pemda Madiun	8
23	Menteri Pertanian	1
24	PT. Kalimantan Electric Power	1
25	PT. Pelindo II	1
26	Kepala Kejaksaan Negeri Praya	3
	Total	110

Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Maret 2017

Tabel 3.1 Total Berita Bulan Maret

Bulan	Surat Kabar Kompas
Maret	393

Tabel 3.2 Jenis-Jenis *Fraud* Bulan Maret

Jenis-jenis <i>Fraud</i>	Surat Kabar Kompas
1	381
2	3
3	9
Total	393

Tabel 3.3 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Daerah di Indonesia

Kota	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Jakarta	353	1	9	363
Banten	9	-	-	9
Bali	1	-	-	1
Surabaya	-	2	-	2
Cimahi	1	-	-	1
Klaten	2	-	-	2
Nganjuk	2	-	-	2
Madiun	3	-	-	3
Maluku	6	-	-	6
Papua	2	-	-	2
Sumatra Barat	2	-	-	2
Total	381	3	9	393

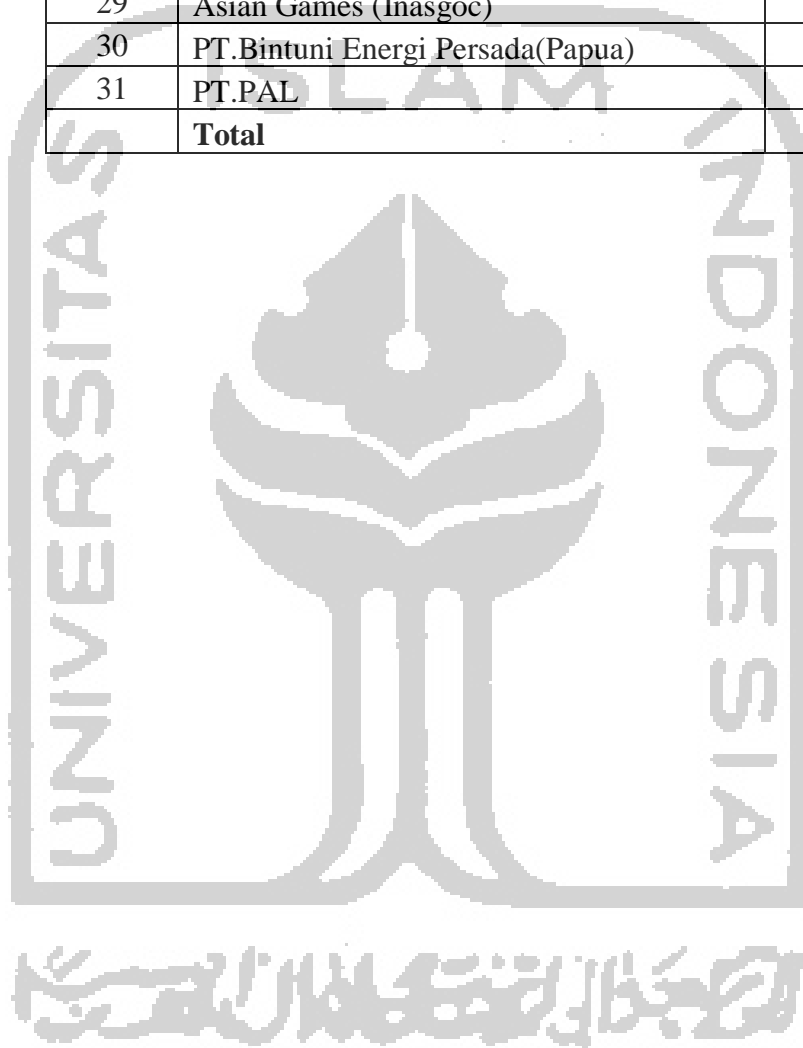
Tabel 3.4 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Pemerintahan Di Indonesia

Tingkat Yuridiksi	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Pusat	353	1	9	363
Daerah	28	2	-	30
Total	381	3	9	393

Tabel 3.5 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Departemen-Departemen

No	Dapartemen-dapartemen	Frekuensi
1	Badan Keamanan Laut	8
2	Ditjen Pajak	14
3	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	1
4	Dinas PU Provinsi Papua	1
5	Kementrian Dalam Negeri	1
6	Kementrian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR)	11
7	Menteri Kesehatan	1
8	Atase Imigrasi Kedubes Malay	1
9	Pemprov DKI	1
10	BUMN / Garuda Indonesia	7
11	Mahkamah Konstitusi	13
12	Hambalang	2
13	Kasus E-KTP	278
14	Pemda Cimahi	1
15	DPD RI	4
16	Ditjen P2KTrans Kementrian Tenaga Kerja	2
17	Pemda Madiun	3
18	Lain-Lain	8
19	POLRI	2
20	Pemda Klaten	2
21	Pemprov Sumatra Utara	2
22	PT. Pelindo II	1
23	Pemda Nganjuk	2

24	DPR RI	3
25	Pemprov Banten	9
26	Universitas Udayana	1
27	Kejaksaan Agung	1
28	Perlindungan Hortikultura Kementerian Pertanian	1
29	Asian Games (Inasgoc)	1
30	PT.Bintuni Energi Persada(Papua)	1
31	PT.PAL	10
	Total	393



Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan April 2017

Tabel 4.1 Total Berita Bulan April

Bulan	Surat Kabar Kompas
April	171

Tabel 4.2 Jenis-Jenis *Fraud* Bulan April

Jenis-jenis <i>Fraud</i>	Surat Kabar Kompas
1	171
2	
3	
Total	171

Tabel 4.3 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Daerah di Indonesia

Kota	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Jakarta	168	-	-	168
Madiun	1	-	-	1
Klaten	2	-	-	2
Total	171	0	0	171

Tabel 4.4 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Pemerintahan di Indonesia

Tingkat Yuridiksi	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Pusat	168	-	-	168
Daerah	3	-	-	3
Total	171	0	0	171

Tabel 4.5 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Departemen-Departemen

No	Departemen-departemen	Frekuensi
1	Badan Keamanan Laut	10
2	Menteri Kesehatan	4
3	Kasus E-KTP	124
4	DPRD	1
5	Mahkamah Konstitusi	4
6	PT PAL	7
7	Menteri Desa	2
8	Ditjen Pajak	3
9	Ditjen P2kTrans	2
10	Pemerintah Kota Madiun	1
11	Badan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)	7
12	Pemerintah Daerah Klaten	2
13	Ditjen Binmas Islam Kementerian Agama	3
14	Atase Imigrasi	1
	Total	171

Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Mei 2017

Tabel 5.1 Total Berita Bulan Mei

Bulan	Surat Kabar Kompas
Mei	316

Tabel 5.2 Jenis-Jenis *Fraud* Bulan Mei

Jenis-jenis <i>Fraud</i>	Surat Kabar Kompas
1	313
2	1
3	2
Total	316

Tabel 5.3 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Daerah di Indonesia

Kota	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Jakarta	310	1	2	313
Buton	1	-	-	1
Maluku	2	-	-	2
Total	313	1	2	316

Tabel 5.4 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Pemerintahan di Indonesia

Tingkat Yuridiksi	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Pusat	310	1	2	313
Daerah	3	-	-	3
Total	313	1	2	316

Tabel 5.5 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Departemen-Departemen

No	Departemen-departemen	Frekuensi
1	Badan Keamanan Laut	11
2	Ditjen Pajak	18
3	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR)	7
4	Menteri Kesehatan	19
5	BUMN / Garuda Indonesia	1
6	Mahkamah Konstitusi	16
7	Hambalang	4
8	Kasus E-KTP	162
9	DPD RI	1
10	Lain-Lain	5
11	TNI	6
12	DPR RI	1
13	Ditjen Binmas Islam Kementerian Agama	30
14	Universitas Udayana	2
	Kwarda Pramuka(DKI)	1
16	Perlindungan Hortikultura Kementerian Pertanian	1
17	Bantuan likuiditas bank indonesia(BLBI)	25
18	PT.asuransi jasa Indonesia	2
19	PT.PAL	4
	Total	316

Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Juni 2017

Tabel 6.1 Total Berita Bulan Juni

Bulan	Surat Kabar Kompas
Juni	270

Tabel 6.2 Jenis-Jenis *Fraud*

Jenis-jenis <i>Fraud</i>	Surat Kabar Kompas
1	262
2	4
3	4
Total	270

Tabel 6.3 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Daerah di Indonesia

Kota	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Jakarta	190	4	3	197
Mojokerto (Jatim)	32	-	-	32
Maluku	6	-	-	6
Bengkulu	31	-	-	31
Papua	1	-	-	1
Banten	3	-	-	3
Total	263	4	3	270

Tabel 6.4 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Pemerintahan Indonesia

Tingkat Yuridiksi	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Pusat	190	4	3	197
Daerah	73	-	-	73
Total	263	4	3	270

Tabel 6.5 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Departemen-Departemen

No	Departemen-departemen	Frekuensi
1	Badan Keamanan Laut	4
2	Ditjen Pajak	13
3	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	3
4	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	1
5	BPK	6
6	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR)	7
7	Menteri Kesehatan	47
8	Pembangunan Daerah Tertinggal&Transmigrasi	2
9	Pemprov Jatim	17
10	BUMN / Garuda Indonesia	1
11	Mahkamah Konstitusi	19
12	Hambalang	8
13	Kasus E-KTP	49
14	Pemprov Banten	3
	PT Pertamina	3
16	Ditjen P2KTrans Kementerian Tenaga Kerja	1
17	Pemprov Bengkulu	37
18	Lain-Lain	9
19	POLRI	1
	PT Garam	7
21	Bank Pembangunan Daerah Papua	1
22	PT. Pelindo II	1
23	TNI	4
24	DPR RI	2
25	Ditjen Binmas Islam Kementerian Agama	3
26	Dinas Pekerja umum dan penataan ruang Mojokerto	15
27	Bantuan likuiditas bank indonesia(BLBI)	6
	Total	270

Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Juli 2017

Tabel 7.1 Total Berita Bulan Juli

Bulan	Surat Kabar Kompas
Juli	295

Tabel 7.2 Jenis-Jenis *Fraud*

Jenis-jenis <i>Fraud</i>	Surat Kabar Kompas
1	294
2	-
3	1
Total	295

Tabel 7.3 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Daerah di Indonesia

Kota	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Jakarta	279	-	1	280
Sulawesi Tenggara	3	-	-	3
Banten	3	-	-	3
Bengkulu	1	-	-	1
Maluku	7	-	-	7
Klaten	1	-	-	1
Total	294	0	1	295

Tabel 7.4 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Pemerintahan Indonesia

Tingkat Yuridiksi	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Pusat	279	-	1	280
Daerah	15	-	-	15
Total	294	-	1	295

Tabel 7.5 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Departemen-Departemen

No	Dapartemen-dapartemen	Frekuensi
1	Badan Keamanan Laut	7
2	Ditjen Pajak	6
3	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	4
4	DPR RI	1
5	Pemprov DKI	1
6	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR)	7
7	Univ Udaya(RS Pend Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata)	5
8	BLBI	2
9	Ditjen Binmas Islam Kementerian Agama	6
10	BPK	3
11	Mahkamah Konstitusi	22
12	Pembangunan Daerah Tertinggal&Transmigrasi	2
13	Kasus E-KTP	210
14	Pemda Klaten	1
	Kejaksaan Tinggi(Pemprov Bengkulu)	1
16	Pemda Banten	3
17	Pemprov sulawesi tenggara	3
18	Lain-Lain	6
19	Hambalang	3
20	PT. PAL	2
	Total	295



Tabel 8.1 Total Berita Bulan Agustus

Bulan	Surat Kabar Kompas
Agustus	346

Tabel 8.2 Jenis-Jenis *Fraud*

Jenis-jenis <i>Fraud</i>	Surat Kabar Kompas
1	243
2	1
3	2
Total	246

Tabel 8.3 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Daerah di Indonesia

Kota	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Jakarta	251	-	2	253
Jawa Tengah	1	-	-	1
Maluku	4	-	-	4
Papua	1	-	-	1
Madiun	1	-	-	1
Banten	1	-	-	1
Jawa Timur	5	-	-	5
Bengkulu	4	-	-	4
Pamekasan	33	-	-	33
Aceh Barat	-	1	-	1
Riau	5	-	-	5
Malang	16	-	-	16
Mojokerto	2	-	-	2
Tegal	19	-	-	19
Total	343	1	2	346

Tabel 8.4 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Pemerintahan Indonesia

Tingkat Yuridiksi	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Pusat	251	-	2	153
Daerah	92	1	-	93
Total	343	1	2	246

Tabel 8.5 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Departemen-Departemen

No	Dapartemen-dapartemen	Frekuensi
1	Badan Keamanan Laut	4
2	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR)	4
3	Kasus E-KTP	115
4	DPR RI	2
5	Pertamina	2
6	BUMN	3
7	Mahkamah Konstitusi	19
8	Ditjen P2KTrans Kementerian Tenaga Kerja	3
9	Pemerintahan Daerah Madiun	3
10	Pemerintah Daerah Pamekasan	35
11	Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan 1	1
12	Pemerintahan Daerah Riau	5
13	Pemerintahan Daerah Malang	16
14	Menteri Desa	3
	Kementerian Hubungan	33
16	Pemerintahan Tegal	19
17	Mahkamah Agung	1
18	Lain- Lain	6
19	Pemerintahan Provinsi Banten 2	2
20	Rumah Sakir Udayana	3
	Kejaksaan Agung	4
22	POLRI	1
23	Ditjen Binmas Islam Kementerian Agama	13
24	Tentara Nasional Indonesia(TNI)	1
25	Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia	10
26	Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi (PDTT) 1	1

27	Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	5
28	Kejaksaan Tinggi Bengkulu	5
29	Bank Pembangunan Daerah Papua	1
30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mojokerto	2
31	Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara	23
32	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	1
	Total	346



Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan September 2017

Tabel 9.1 Total Berita Bulan September

Bulan	Surat Kabar Kompas
September	393

Tabel 9.2 Jenis-Jenis *Fraud*

Jenis-jenis <i>Fraud</i>	Surat Kabar Kompas
1	284
2	-
3	9
Total	293

Tabel 9.3 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Daerah di Indonesia

Kota	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Jakarta	288	-	9	297
Tegal	4	-	-	4
Pamekasan	4	-	-	4
Bengkulu	16	-	-	16
Sumatera Utara	12	-	-	12
Banjarmasin	8	-	-	8
Malang	16	-	-	16
Maluku	1	-	-	1
Cilegon	19	-	-	19
Banten	1	-	-	1
Kutai Kartanegara	14	-	-	14
Sulawesi tenggara	1	-	-	1
Total	384	0	9	393

Tabel 9.4 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Pemerintahan Indonesia

Tingkat Yuridiksi	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Pusat	288	-	9	297
Daerah	96	-	-	96
Total	384	-	9	393

Tabel 9.5 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Departemen-Departemen

No	Departemen-departemen	Frekuensi
1	Badan Keamanan Laut	1
2	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR)	1
3	Kasus E-KTP	195
4	DPR RI	5
5	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	1
6	Pertamina	2
7	BUMN	3
8	Mahkamah Konstitusi	14
9	Pemerintahan Provinsi DKI (Podomoro land)	1
10	Pemerintahan Daerah Malang	16
11	Menteri Desa	5
12	Kementerian Hubungan	4
13	Pemerintahan Tegal	4
14	Mahkamah Agung	1
	Pemda Sumatera Utara (Batubara)	17
16	PDAM Banjarmasin	8
17	Pemerintah Kota Cilegon	19
18	Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	1
19	Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara	19
20	Lain- Lain	14
	Pemerintahan Provinsi Banten	1
22	Rumah Sakit Udayana	1
23	Kejaksaan Agung	3
24	POLRI	1
25	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)	1
26	Ditjen Binmas Islam Kementerian Agama	7

27	Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia	25
28	Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi (PDTT)	2
29	Kejaksaan Tinggi Bengkulu	16
30	Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara	1
31	Pemerintah Daerah Pamekasan	4
	Total	393



Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Oktober 2017

Tabel 10.1 Total Berita Bulan Oktober

Bulan	Surat Kabar Kompas
Oktober	246

Tabel 10.2 Jenis-Jenis *Fraud*

Jenis-jenis <i>Fraud</i>	Surat Kabar Kompas
1	243
2	-
3	3
Total	246

Tabel 10.3 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Daerah di Indonesia

Kota	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Jakarta	170	-	3	173
Konawe	7	-	-	7
Pamekasan	1	-	-	1
Bengkulu	1	-	-	1
Sumatera Utara	3	-	-	3
Banjarmasin	1	-	-	1
Malang	12	-	-	12
Jatim	1	-	-	1
Cilegon	3	-	-	3
Dumai	2	-	-	2
Kutai Kartanegara	10	-	-	10
Sulawesi tenggara	1	-	-	1
Papua	1	-	-	1
Subang	1	-	-	1
Manado	15	-	-	15
Batu Bara	1	-	-	1
Surakarta	1	-	-	1
Nganjuk	12	-	-	12
Total	243	0	3	246

Tabel 10.4 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Pemerintahan Indonesia

Tingkat Yuridiksi	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Pusat	168	-	3	171
Daerah	75	-	-	75
Total	243	-	3	246

Tabel 10.5 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Departemen-Departemen

No	Departemen-departemen	Frekuensi
1	Badan Keamanan Laut	1
2	Lain- Lain	11
3	Kasus E-KTP	106
4	DPR RI	9
5	Pemerintahan Kabupaten Nganjuk	12
6	Atase Imigrasi	5
7	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	2
8	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	10
9	Pemerintah Daerah Konawe Utara	7
10	1DPRD	2
11	Pemerintah Daerah Dumai 2	2
12	Pemerintah Kabupaten Subang	1
13	Pengadilan Tinggi Manado	15
14	Pemerintah Kota Surakarta	1
15	Pemerintahan Provinsi DKI (Podomoro land)	1
16	Pemda Sumatera Utara (Batubara)	4
17	PDAM Banjarmasin	1
18	Pemerintah Kota Cilegon	3
19	PORLI	1
20	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)	2
21	Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara	1
22	Ditjen Binmas Islam Kementerian Agama	1
23	Tentara Nasional Indonesia(TNI)	4
24	Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK)	15

25	Kejaksaan Tinggi Bengkulu	1
26	Bank Pembangunan Daerah Papua	1
27	Pemerintah Daerah Pamekasan	1
28	Pemerintahan Kota Malang	12
29	Menteri Desa	4
30	Kementerian Perhubungan	10
	Total	246



Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan November 2017

Tabel 11.1 Total Berita Bulan November

Bulan	Surat Kabar Kompas
November	368

Tabel 11.2 Jenis-Jenis *Fraud*

Jenis-jenis <i>Fraud</i>	Surat Kabar Kompas
1	367
2	-
3	1
Total	368

Tabel 11.3 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Daerah di Indonesia

Kota	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Jakarta	343	-	1	344
Nganjuk	2	-	-	2
Batu Bara	1	-	-	1
Bengkulu	1	-	-	1
Sumatera Utara	1	-	-	1
Jambi	6	-	-	6
Malang	1	-	-	1
Maluku	6	-	-	6
Mojokerto	1	-	-	1
Banten	1	-	-	1
Kutai Kartanegara	1	-	-	1
Sulawesi tenggara	3	-	-	3
Total	367	0	1	368

Tabel 11.4 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Pemerintahan Indonesia

Tingkat Yuridiksi	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Pusat	343	-	1	344
Daerah	24	-	-	24
Total	367	-	1	368

Tabel 11.5 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Departemen-Departemen

No	Departemen-departemen	Frekuensi
1	Tentara Nasional Indonesia(TNI)	4
2	Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia	5
3	Kasus E-KTP	311
4	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR)	8
5	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	4
6	Pemerintahan Daerah Nganjuk	2
7	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)	2
8	Pemerintahan Provinsi Banten	1
9	Rumah Sakit Udayana	2
10	Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi (PDTT)	1
11	Pertamina	1
12	PT KAI	2
13	Lain- Lain	3
14	Kejaksaan Tinggi Bengkulu	1
15	Pemerintahan Daerah Malang	1
16	Menteri Desa	1
17	Kementerian Hubungan	6
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mojokerto	1
19	Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara	3
20	Pemda Sumatera Utara (Batubara)	2
21	Pemprov Jambi	6
22	Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara	1
	Total	368

Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Desember 2017

Tabel 12.1 Total Berita Bulan Desember

Bulan	Surat Kabar Kompas
Desember	145

Tabel 12.2 Jenis-Jenis *Fraud*

Jenis-jenis <i>Fraud</i>	Surat Kabar Kompas
1	141
2	-
3	4
Total	145

Tabel 12.3 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Daerah di Indonesia

Kota	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Jakarta	127	-	4	131
Mojokerto	4	-	-	4
Nganjuk	2	-	-	2
Jambi	6	-	-	6
Tegal	1	-	-	1
Sulawesi tenggara	1	-	-	1
Total	141	-	4	145

Tabel 12.4 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Pemerintahan Indonesia

Tingkat Yuridiksi	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Pusat	127	-	4	131
Daerah	14	-	-	14
Total	141	-	4	145

Tabel 12.5 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Departemen-Departemen

No	Departemen-departemen	Frekuensi
1	Badan Keamanan Laut	1
2	Lain- Lain	4
3	Kasus E-KTP	98
4	Pemkot Mojokerto	4
5	Pemerintahan Kabupaten Nganjuk	2
6	Pmprov Jambi	6
7	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	1
8	Pemkot Tegal	1
9	Pmprov Sulawesi Tenggara	1
10	PUPR	2
11	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)	4
12	Tentara Nasional Indonesia(TNI)	2
13	Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK)	4
14	Kementerian Perhubungan	15
	Total	145

Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Januari 2018

Tabel 1.1 Total Berita Bulan Januari

Bulan	Surat Kabar Kompas
Januari	107

Tabel 1.2 Jenis-Jenis *Fraud*

Jenis-jenis <i>Fraud</i>	Surat Kabar Kompas
1	107
2	-
3	-
Total	107

Tabel 1.3 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Daerah di Indonesia

Kota	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Jakarta	88	-	-	88
Halmahera Timur	1	-	-	1
Hulu sungai	2	-	-	2
Jambi	12	-	-	12
Kebumen	2	-	-	2
Kutai Kartanegara	2	-	-	2
Total	107	-	-	107

Tabel 1.4 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Pemerintahan Indonesia

Tingkat Yuridiksi	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Pusat	88	-	-	88
Daerah	19	-	-	19
Total	107	0	0	107

Tabel 1.5 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Departemen-Departemen

No	Departemen-departemen	Frekuensi
1	Pemerintah Provinsi Jambi	12
2	Kasus E-KTP (Kemendagri)	88
3	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kebumen	2
4	Pemerintah Daerah Hulu Sungai	2
5	Pemerintahan Kutai Kartanegara	2
6	Pemerintahan Provinsi Maluku	1
	Total	107



Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Februari 2018

Tabel 2.1 Total Berita Bulan Februari

Bulan	Surat Kabar Kompas
Februari	144

Tabel 2.2 Jenis-Jenis *Fraud* Bulan Februari

Jenis-jenis <i>Fraud</i>	Surat Kabar Kompas
1	141
2	-
3	3
Total	144

Tabel 2.3 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Daerah di Indonesia

Kota	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Jakarta	111	-	3	114
Subang	1	-	-	1
Sumatra Utara	7	-	-	7
Jambi	3	-	-	3
Jawa timur	12	-	-	12
Kutai Kartanegara	6	-	-	6
Ngada	1	-	-	1
Total	141	0	3	144

Tabel 2.4 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Pemerintahan Indonesia

Tingkat Yuridiksi	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Pusat	111	-	3	114
Daerah	30	-	-	30
Total	141	0	3	144

Tabel 2.5 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Departemen-Departemen

No	Departemen-departemen	Frekuensi
1	Pemerintah Provinsi Jambi	3
2	Kasus E-KTP (Kemendagri)	114
3	Pemerintah daerah Ngada	1
4	Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara	7
5	Pemerintahan Kutai Kartanegara	6
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang JATIM	12
7	Pemerintah Daerah subang	1
	Total	144



Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Maret 2018

Tabel 3.1 Total Berita Bulan Maret

Bulan	Surat Kabar Kompas
Maret	92

Tabel 3.2 Jenis-Jenis *Fraud* Bulan Maret

Jenis-jenis <i>Fraud</i>	Surat Kabar Kompas
1	86
2	4
3	2
Total	92

Tabel 3.3 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Daerah di Indonesia

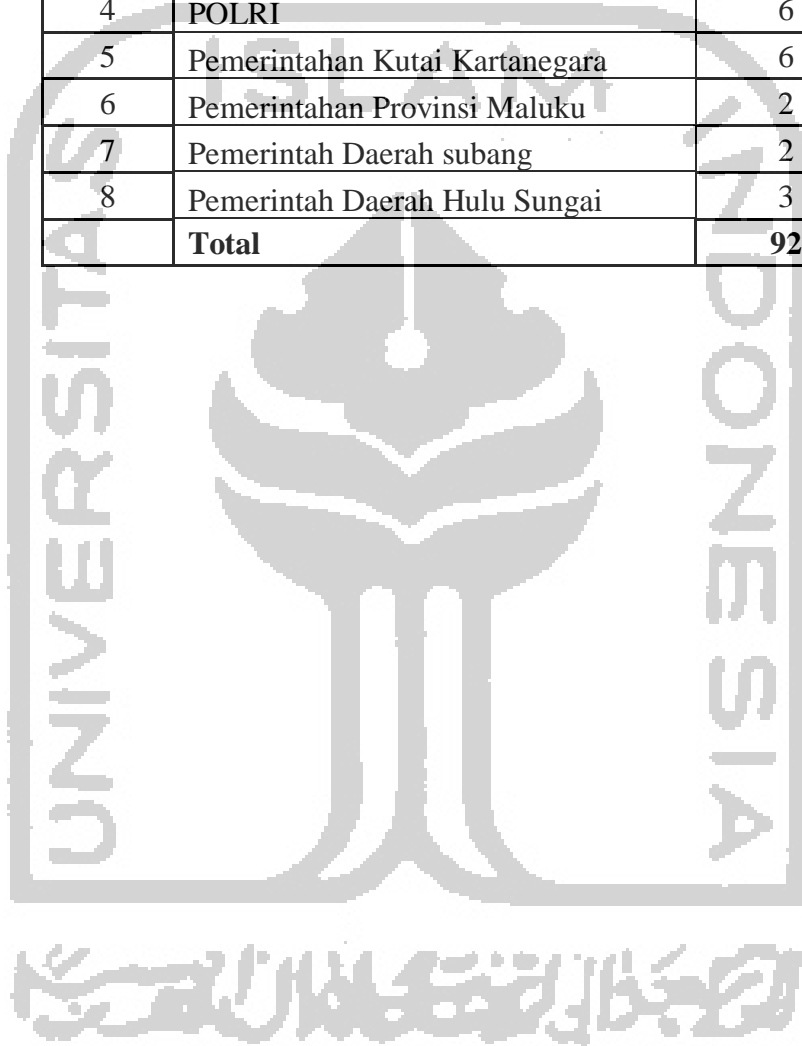
Kota	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Jakarta	69	4	2	75
Subang	2	-	-	2
Sulawesi tenggara	4	-	-	4
Jambi	2	-	-	2
Halmahera Timur	2	-	-	2
Kutai Kartanegara	2	-	-	2
Hulu Sungai	5	-	-	5
Total	86	4	2	92

Tabel 3.4 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Pemerintahan Di Indonesia

Tingkat Yuridiksi	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Pusat	69	4	3	75
Daerah	17	-	-	17
Total	86	4	3	92

Tabel 3.5 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Departemen-Departemen

No	Departemen-departemen	Frekuensi
1	Pemerintah Provinsi Jambi	2
2	Kasus E-KTP (Kemendagri)	69
3	Pemerintah daerah Ngada	2
4	POLRI	6
5	Pemerintahan Kutai Kartanegara	6
6	Pemerintahan Provinsi Maluku	2
7	Pemerintah Daerah subang	2
8	Pemerintah Daerah Hulu Sungai	3
	Total	92



Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan April 2018

Tabel 4.1 Total Berita Bulan April

Bulan	Surat Kabar Kompas
April	105

Tabel 4.2 Jenis-Jenis *Fraud* Bulan April

Jenis-jenis <i>Fraud</i>	Surat Kabar Kompas
1	105
2	-
3	-
Total	105

Tabel 4.3 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Daerah di Indonesia

Kota	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Jakarta	81	-	-	81
Cirebon	2	-	-	2
Cianjur	2	-	-	2
Mojokerto	6	-	-	6
Halmahera Timur	2	-	-	2
Sumatra Utara	3	-	-	3
Hulu Sungai	3	-	-	3
Sulawesi Tenggara	1	-	-	1
Sulawesi Utara	1	-	-	1
Malang	2	-	-	2
Jambi	2	-	-	2
Total	105	0	0	105

Tabel 4.4 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Pemerintahan di Indonesia

Tingkat Yuridiksi	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Pusat	81	-	-	81
Daerah	24	-	-	24
Total	105	0	0	105

Tabel 4.5 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Departemen-Departemen

No	Departemen-departemen	Frekuensi
1	Pemerintah Provinsi Jambi	2
2	Kasus E-KTP (Kemendagri)	80
3	DPD RI	2
4	Kementerian Hubungan	4
5	Pemerintahan Kota Cirebon	2
6	Pemerintahan Provinsi Maluku	3
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang JATIM	2
8	Pemerintah Daerah Hulu Sungai	3
9	Kemertian Luar Negeri	5
10	Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara	1
11	Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara	1
	Total	105

Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Mei 2018

Tabel 5.1 Total Berita Bulan Mei

Bulan	Surat Kabar Kompas
Mei	111

Tabel 5.2 Jenis-Jenis *Fraud* Bulan Mei

Jenis-jenis <i>Fraud</i>	Surat Kabar Kompas
1	102
2	2
3	7
Total	111

Tabel 5.3 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Daerah di Indonesia

Kota	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Jakarta	64	2	7	73
Buton	3	-	-	3
Bengkulu	2	-	-	2
Kebumen	1	-	-	1
Halmahera Timur	3	-	-	3
Jawan Timur	4	-	-	4
Mojokerto	8	-	-	8
Sumatra Utara	4	-	-	4
Hulu Sungai	6	-	-	6
Malang	5	-	-	5
Jambi	2	-	-	2
Total	102	2	7	111

Tabel 5.4 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Pemerintahan di Indonesia

Tingkat Yuridiksi	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Pusat	81	2	7	90
Daerah	21	-	-	21
Total	102	2	7	111

Tabel 5.5 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Departemen-Departemen

No	Departemen-departemen	Frekuensi
1	Pemerintah Provinsi Jambi	2
2	Kasus E-KTP (Kemendagri)	22
3	DPR RI	17
4	Kementerian Hubungan	17
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang JATIM	13
6	Pemerintahan Provinsi Maluku	3
7	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	2
8	Pemerintah Daerah Hulu Sungai	3
9	Pemerintah Provinsi DKI (Podomoro Land)	13
10	Lain-lain	6
11	Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara	4
12	Otorisasi Jasa Keuangan (OJK)	9
	Total	111

Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Juni 2018

Tabel 6.1 Total Berita Bulan Juni

Bulan	Surat Kabar Kompas
Juni	49

Tabel 6.2 Jenis-Jenis *Fraud*

Jenis-jenis <i>Fraud</i>	Surat Kabar Kompas
1	49
2	
3	
Total	49

Tabel 6.3 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Daerah di Indonesia

Kota	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Jakarta	22	-	-	17
Jawa Tengah	11	-	-	11
Sumatra Barat	5	-	-	5
Kebumen	3	-	-	3
Jawa Timur	8	-	-	8
Total	49	-	-	49

Tabel 6.4 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Pemerintahan Indonesia

Tingkat Yuridiksi	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Pusat	22	-	-	22
Daerah	27	-	-	27
Total	49	0	0	49

Tabel 6.5 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Departemen-Departemen

No	Departemen-departemen	Frekuensi
1	Kejaksaan Tinggi Tangerang	7
2	Kasus E-KTP (Kemendagri)	10
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang JATIM	12
4	Kementrian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR)	8
5	Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia	12
	Total	49



Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Juli 2018

Tabel 7.1 Total Berita Bulan Juli

Bulan	Surat Kabar Kompas
Juli	100

Tabel 7.2 Jenis-Jenis *Fraud*

Jenis-jenis <i>Fraud</i>	Surat Kabar Kompas
1	95
2	2
3	3
Total	100

Tabel 7.3 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Daerah di Indonesia

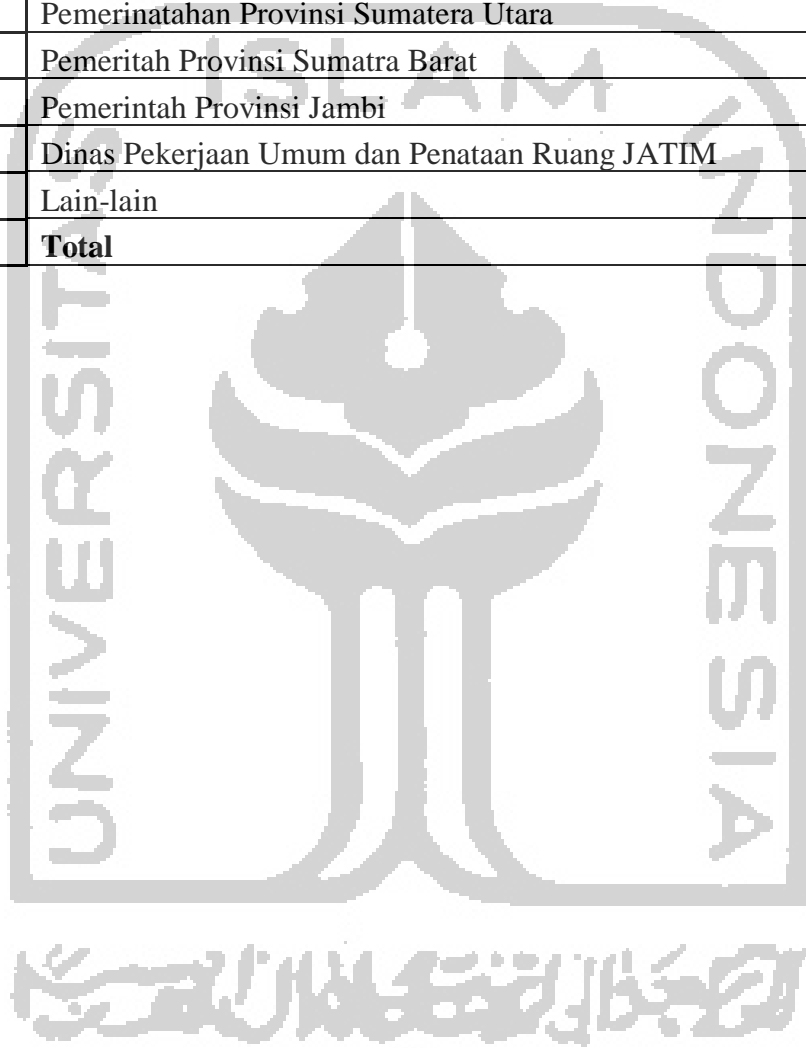
Kota	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Jakarta	64	2	3	69
Labuhan Batu	3	-	-	3
Sulawesi Tenggara	6	-	-	6
Sumatra Barat	5	-	-	5
Sumatra Utara	3	-	-	3
Mojokerto	4	-	-	4
Jambi	8	-	-	8
Bhener Meriah	2	-	-	2
Total	95	2	3	100

Tabel 7.4 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Pemerintahan Indonesia

Tingkat Yuridiksi	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Pusat	64	2	3	69
Daerah	31	-	-	31
Total	95	2	3	100

Tabel 7.5 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Departemen-Departemen

No	Departemen-departemen	Frekuensi
1	Pemerintah Provinsi Jambi	49
2	DPD RI	15
3	Pemerintahan Daerah Bener Meriah	5
4	Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara	3
5	Pemerintah Provinsi Sumatra Barat	5
6	Pemerintah Provinsi Jambi	8
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang JATIM	4
8	Lain-lain	11
	Total	100



Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Agustus 2018

Tabel 8.1 Total
Agustus

Berita Bulan

Bulan	Surat Kabar Kompas
Agustus	69

Tabel 8.2 Jenis-Jenis *Fraud*

Jenis-jenis <i>Fraud</i>	Surat Kabar Kompas
1	64
2	4
3	1
Total	69

Tabel 8.3 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Daerah di Indonesia

Kota	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Jakarta	22	4	1	27
Bengkulu	4	-	-	4
Sumatra Utara	4	-	-	4
Mojokerto	3	-	-	3
Jambi	5	-	-	5
Riau	18	-	-	18
Mojokerto	3	-	-	3
Labuhan Batu	2	-	-	2
Jawa Tengah	3	-	-	3
Total	64	4	1	69

Tabel 8.4 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Pemerintahan Indonesia

Tingkat Yuridiksi	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Pusat	22	4	1	27
Daerah	42	-	-	42
Total	64	4	1	69

Tabel 8.5 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Departemen-Departemen

No	Departemen-departemen	Frekuensi
1	Pemerintah Provinsi Jambi	15
2	Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara	4
3	Pemerintahan Daerah Riau	18
4	Garuda Indonesia	12
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang JATIM	3
8	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	3
7	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	6
8	Perusahaan Listrik Negara (PLN)	8
	Total	69



Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan September 2018

Tabel 9.1 Total Berita Bulan September

Bulan	Surat Kabar Kompas
September	74

Tabel 9.2 Jenis-Jenis *Fraud*

Jenis-jenis <i>Fraud</i>	Surat Kabar Kompas
1	71
2	1
3	2
Total	74

Tabel 9.3 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Daerah di Indonesia

Kota	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Jakarta	16	1	2	19
Malang	5	-	-	5
Jambi	11	-	-	11
Bhener Meriah	2	-	-	2
Hulu Sungai	2	-	-	2
Labuhan Batu	1	-	-	1
Jawa Tengah	9	-	-	9
Riau	21	-	-	21
Sulawesi Tenggara	4	-	-	4
Total	71	1	2	74

Tabel 9.4 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Pemerintahan Indonesia

Tingkat Yuridiksi	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Pusat	16	1	2	19
Daerah	55	-	-	55
Total	71	1	2	74

Tabel 9.5 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Departemen-Departemen

No	Departemen-departemen	Frekuensi
1	Pemerintah Provinsi Jambi	11
2	Pemerintah Daerah Hulu Sungai	2
3	Pemerintahan Daerah Bener Meriah	2
4	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olaraga Kebumen	6
5	Pemerintah Provinsi DKI (Podomoro Land)	16
6	Lain-lain	2
7	Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara	4
8	Pemerintahan Daerah Riau	21
9	Otorisasi Jasa Keuangan (OJK)	5
10	Kementerian Perhubungan	5
	Total	74

Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Oktober 2018

Tabel 10.1 Total Berita Bulan Oktober

Bulan	Surat Kabar Kompas
Oktober	116

Tabel 10.2 Jenis-Jenis *Fraud*

Jenis-jenis <i>Fraud</i>	Surat Kabar Kompas
1	114
2	2
3	-
Total	116

Tabel 10.3 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Daerah di Indonesia

Kota	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Jakarta	7	2	-	9
Papua	2	-	-	2
Buton	2	-	-	2
Riau	7	-	-	7
Jambi	96	-	-	96
Total	114	2	-	116

Tabel 10.4 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Pemerintahan Indonesia

Tingkat Yuridiksi	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Pusat	11	2	-	13
Daerah	103	-	-	103
Total	114	2	0	116

Tabel 10.5 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Departemen-Departemen

No	Departemen-departemen	frekuensi
1	Pemerintah Provinsi Jambi	96
2	Pemerintah Provinsi Papua	2
3	Pemerintahan Daerah Riau	7
4	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)	11



Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan November 2018

Tabel 11.1 Total Berita Bulan November

Bulan	Surat Kabar Kompas
November	112

Tabel 11.2 Jenis-Jenis *Fraud*

Jenis-jenis <i>Fraud</i>	Surat Kabar Kompas
1	108
2	-
3	4
Total	112

Tabel 11.3 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Daerah di Indonesia

Kota	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Jakarta	83	-	4	87
Sumatra Utara	5	-	-	5
Pakpak Barat	2	-	-	2
Pasuruan	2	-	-	2
Jambi	3	-	-	3
Labuhan Batu	4	-	-	4
Riau	5	-	-	5
Sumatra Barat	4	-	-	4
Total	108	0	4	112

Tabel 11.4 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Pemerintahan Indonesia

Tingkat Yuridiksi	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Pusat	83	-	4	87
Daerah	25	-	-	25
Total	108	0	4	112

Tabel 11.5 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Departemen-Departemen

No	Departemen-departemen	Frekuensi
1	Pemerintah Provinsi Jambi	3
2	Kejaksaan Tinggi Tangerang	11
3	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	2
4	Kementerian Dalam Negeri	13
5	Pemerintah Provinsi DKI (Podomoro Land)	12
6	Lain-lain	10
7	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)	11
8	Pemerintahan Daerah Riau	5
9	Perusahaan Listrik Negara (PLN)	28
10	Pemerintah Daerah Pakpak Bhener	2
11	Pemerintah Provinsi Sumatra Barat	4
12	Pemerintah Daerah NTT	11
	Total	112

Pemberitaan Tindak Kecurangan Bulan Desember 2018

Tabel 12.1 Total Berita Bulan Desember

Bulan	Surat Kabar Kompas
Desember	106

Tabel 12.2 Jenis-Jenis *Fraud*

Jenis-jenis <i>Fraud</i>	Surat Kabar Kompas
1	102
2	1
3	3
Total	106

Tabel 12.3 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Daerah di Indonesia

Kota	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Jakarta	53	1	2	56
Malang	13	-	-	13
Cianjur	4	-	-	4
Riau	13	-	-	13
Jambi	2	-	-	2
Pasuruan	4	2	-	4
Jawa Tengah	11	-	-	11
Cirebon	3	-	-	3
Total	103	3	2	106

Tabel 12.4 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Pemerintahan Indonesia

Tingkat Yuridiksi	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Pusat	53	1	2	56
Daerah	50	-	-	50
Total	103	1	2	106

Tabel 12.5 Distribusi Pemberitaan Berdasarkan Departemen-Departemen

No	Departemen-departemen	Frekuensi
1	Pemerintah Provinsi Jambi	2
2	Kasus E-KTP (Kemendagri)	8
3	Pemerintahan Daerah Riau	13
4	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)	9
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang JATIM	17
8	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	12
7	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)	23
8	Perusahaan Listrik Negara (PLN)	13
9	Lain-lain	9
	Total	106



Tabel 12.6 Rangkuman Pemberitaan Berdasarkan Daerah di Indonesia

Kota	jenis-jenis <i>fraud</i>						total	
	1		2		3		2017	2018
	2017	2018	2017	2018	2017	2018		
Jakarta	2712	714	18	15	45	23	2775	752
Bengkulu	50	11					50	11
Malang	45	35					45	35
Maluku	41	14					41	14
Pamekasan	38						38	
Kutai Kartanegara	25	29					25	29
Cilegon	25						25	
Mojokerto	24	36					24	36
Tegal	23						23	
Nganjuk	20	4					20	4
Sumatera Utara	20	19					20	19
Banten	16	4					16	4
Manado	15						15	
Klaten	13						13	
Jambi	13	39					13	39
Buton	11	12					11	12
Madiun	11	6					11	6
Banjarmasin	9	3					9	3
Sulawesi Tenggara	9	23					9	23
Sumatra Barat	8	5					8	5
Jawa Tengah	3	26					3	26
Papua	6	1					6	1
Jawa Timur	6	37					6	37
Komawe	7						7	
Riau	6	27					6	27
NTB	3						3	
Cimahi	6						6	
Halmahera Timur	5	5					5	5
Bali	1						1	
Kebumen	2	22					2	22
Aceh Barat			1				1	

Dumai	2						2	
Subang	1	4					1	4
Surakarta	2						2	
Surabaya		7	2				2	7
cirebon		7						7
Pasuruan		2						2
NTT		6						6
Pakpak Bharat		2						2
sulawesi Utara		5						5
Bener Meriah		1						1
Jebara		2						2
Labuan Batu		4						4
Cianjur		5						5
Hulu Sungai		23						23
Ngada		1						1
Kalimantah Tengah		6						6
Total	3188	1147	21	15	45	23	3254	1185

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 كليات جامعة دار العلوم الإسلامية